PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

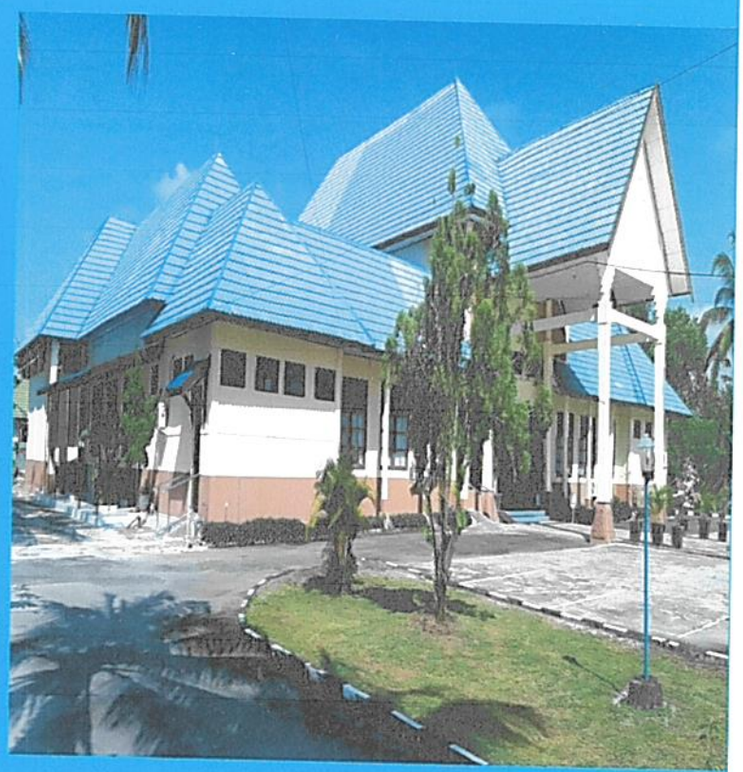

2021

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Pujidansyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyelesaikan pembuatan **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021,** Laporan ini memuat : Pendahuluan, Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, Akreditasi Penjaminan Mutu, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengawasan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya, 10 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARAPALANGKA RAYA

KETUA,

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19731119 199303 2 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PTUN PALANGKA RAYA 8

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama 8
- Keadaan Perkara Tingkat Banding 12
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 14
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 17

B. PENYELESAIAN PERKARA 17

- Jumlah sisa perkara yang diputus 17
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 18
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 21
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi 31
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 31

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) 31

- POSBAKUM 31
- SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU 32
- PERKARA PRODEO 32

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA **33**

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan /pendidikan .....

Mutasi 39

Promosi 40

Pensiun 40

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 40

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 49

A. Pengelolaan Keuangan 49

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 54

C. Pengelolaan Teknologi Informasi 57

D. Implementasi E-Court di PTUN Palangka Raya 57
E. Implementasi SIPP di PTUN Palangka Raya 58
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 63
- Akreditasi Penjaminan Mutu 63
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 65
- Inovasi Pelayanan Publik 67

BABVI PENGAWASAN 70
A. Internal 70
B. Evaluasi 71

BAB VII PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Rekomendasi 73

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUMPERADILAN

Keberadaan Peradilan TataUsaha Negara diberbagai negara modern terutama negara-negara Kesejahteraan (*WelfareState*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya.

Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Pertama : sebagai lembaga control (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum.

Kedua : adalah sebagai wadah melindungi hakim idividu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada

Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat "*externalcontrol*",karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut "*controlaposteriori*", karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yangdikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi"*legalitas*",karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*)- nyasaja.

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inhaerent* atau *alszodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya dalam

melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa: **"Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority)* yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu"**. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely.*

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasikarena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.
Terciptanya Peradilan TataUsaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan termuda dibandingkan dengan peradilan lainnya. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 pada point d adalah "*Untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara diperlukan suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan Peradilan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat*". Dari konsiderans tersebut diatas maka

menjadi jelas, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengontrol tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kontrol Pengadilan kepada Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya merugikan kepentingan rakyat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dibaca dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan ***" Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi".*** Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdiri, semua sengketa tata usaha negara yang melibatkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diwilayah hukum Provinsi KalimantanTengah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Hal tersebut sesuai Pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I.Nomor 41 Tahun 1992 yang menyebutkan :

"Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat didalam wilayah Provinsi Daerah TingkatI Kalimantan Selatan, wilayah tingkat I Kalimantan Tengah dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimanta Timur".

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota BUNTOK;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota TAMIANG LAYANG;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota MUARA TEWEH;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota KUALA KURUN;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota KUALA KAPUAS;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota KASONGAN;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota PANGKALAN BUN;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota SAMPIT;

9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota NANGA BULIK;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota PURUK CAHU;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota PULANG PISAU;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota SUKAMARA;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota KUALA PEMBUANG;
14. Kota PALANGKARAYA

Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian Tengah pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara 0 45" Lintang Utara 3 30" Lintang Selatan dan 111" Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 km² atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia.

Palangka Raya secara geografis terletak di antara 3^{0} 50' LS – 1^{0} 10' LU 110^{0} 20' – 116^{0} 0 BT dengan luas wilayah totalnya 157.983 km² dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.202.599 Jiwa.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalteng adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 km², kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 km² dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas 2.399,50 km².

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan ;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Kahayan, Kapuas Kapuas, Sungai Mentaya, sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten ;

Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Propinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi

penyelesaian sengketa-sengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

B. VISI DAN MISI

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung dan Modern"

MISI

1. *Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan, dan Modern.*
2. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.*
3. *Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.*
4. *Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku*

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa /menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua /Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris) setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat program kerja.

Program kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme pelaksanaanya berupa pelaporan serta pengawasan.

Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan program kerja yang ada pada rencana dan strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas (*Job Description*) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. Menindak lanjuti keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing Hakim menjadi Pengawas Bidang yang tertuang dalam suatu Surat Keputusan No. W2.TUN6/755/K/PW.03.09/VII/2020 tertanggal 01 Juli 2020 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
3. Penyelesaian Perkara pada tingkat pertama maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan sejak diterimanya gugatan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan baik yang diselengarakan oleh Mahkamah Agung maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya.
5. Turut serta melakukan pembaruan sistem peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*Blue Print*) yang dibuat oleh Mahkamah Agung.
6. Berdasarkan amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dukungan Teknologi Informasi telah mempunyai Website dengan *Homepage* : ***https://ptun- palangkaraya.go.id***.
7. Sebagai perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Sejak tahun 2018 sampai sekarang Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang kemudian ditingkatkan kembali pada tahun 2019 dengan penerapan *E-Court* dan MIS (Monitoring Implementasi SIPP).

Dengan program kerja tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga hambatan-hambatan

yang ada dapat di minimalisir, dan dengan terbentuknya Hakim Pengawas Bidang diharapkan dapat memperkuat pengawasan pelaksanaan program kerja dalam mencapai Visi dan Misi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- **Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Sisa Perkara Pada Tahun 2020 : 4 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	24/G/2020/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	07-09-2020	1. HIDEN; 2. DOLE; 3. UHING; 4. DEWI; 5. RUSIANA; 6. BAHING; 7. UNYE SAPIA; 8. INYOK; 9. LUHING; 10.RUSLIYA.	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
02	27/G/2020/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	08-10-2020	MUNARI	KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) / AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)
03	28/G/2020/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	03-11-2020	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
04	31/G/2020/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	10-12-2020	JHON KENEDY	1. BUPATI BARITO UTARA; 2. CAMAT LAHEI;

Perkara Masuk Pada Tahun 2021 : 39 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
01	1/P/FP/2021/PTUN.PLK **(PERMOHONAN)**	04-01-2021	EFFENDI BUHING	BUPATI LAMANDAU
02	1/G/TF/2021/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	07-01-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI, SUKAMARA
03	2/P/FP/2021/PTUN.PLK **(PERMOHONAN)**	08-01-2021	ISLIA LILIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
04	3/P/FP/2021/PTUN.PLK **(PERMOHONAN)**	08-01-2021	ANDRY KP. YUNI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU

05	2/G/2021/PTUN.PLK **(PERIZINAN)**	08-01-2021	ISTI SU'ILAH	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
06	3/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	01-02-2021	Drs. SANGGUL, MT	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
07	4/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	05-02-2021	NIBEL, S.Sos	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
08	5/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	11-02-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
09	6/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	18-02-2021	AMAT	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS
10	7/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	22-02-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
11	8/G/2021/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	25-02-2021	ALIANSI MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI JUJUR DAN ADIL	1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (KPU); 2. BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
12	9/G/2021/PTUN.PLK **(TENDER)**	17-03-2021	MARTIASI UNIK GAWEI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNANGEDUNG PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU. DKK
13	10/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)**	17-03-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU
14	11/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	23-03-2021	IBEN DM,SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
15	12/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	19-04-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
16	13/G/2021/PTUN.PLK **(DESA/LAIN-LAIN)**	30-04-2021	1. NAOMI KRISTIANIGSIH 2. EKA RAHMAWATI	KEPALA DESA LAGAN
17	14/G/2021/PTUN.PLK **(DESA/LAIN-LAIN)**	30-04-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH

18	15/G/KI/2021/PTUN.PLK **(KOMISI INFORMASI)**	06-05-2021	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI
19	16/G/2021/PTUN.PLK **(DESA/LAIN-LAIN)**	19-05-2021	1. SUHARDI 2. ISMAIL 3. MISRANI	KEPALA DESA LIANG NAGA
20	17/G/2021/PTUN.PLK **(DESA/LAIN-LAIN)**	29-05-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA
21	18/G/KI/2021/PTUN.PLK **(KOMISI INFORMASI)**	31-05-2021	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
22	19/G/KI/2021/PTUN.PLK **(KOMISI INFORMASI)**	31-05-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS	1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA
23	20/G/KI/2021/PTUN.PLK **(KOMISI INFORMASI)**	31-05-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
24	21/G/KI/2021/PTUN.PLK **(KOMISI INFORMASI)**	31-05-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
25	22/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	03-06-2021	RENY FERI SULASTRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
26	23/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	07-06-2021	GANTIADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
27	24/G/KI/2021/PTUN.PLK **(KOMISI INFORMASI)**	18-06-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
28	25/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	18-06-2021	Dra. ADJIN WIDEN, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
29	26/G/2021/PTUN.PLK **(DESA/LAIN-LAIN)**	22-06-2021	1. SUWENDIE; 2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADOMING GUS; 5. GENDRI; 6. IMBO	KEPALA DESA PAHAWAN
30	27/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	28-06-2021	1. KHRIS SUHARTA; 2. ARISANDI ABEL;	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS

31	28/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	19-07-2021	1. SITAWATI MAYA DEWI; 2. ERWIN HUDOYONO HANDAYANA;	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
32	29/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	16-09-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
33	30/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	26-10-2021	ERUJONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
34	31/G/2021/PTUN.PLK	02-11-2021	1. AYA RIKA; 2. ERNIE, S.Pd.,MM; 3. HARISONLIMIN; 4. ANA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
35	32/G/2021/PTUN.PLK	02-11-2021	1. AYA RIKA; 2. ERNIE, S.Pd.,MM; 3. HARISONLIMIN; 4. ANA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
36	33/G/2021/PTUN.PLK	17-11-2021	ERUJONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
37	34/G/2021/PTUN.PLK	06-12-2021	SUDIANTO	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA KALANIS, KECAMATAN DUSUN HILIR, KABUPATEN BARITO SELATAN
38	35/G/2021/PTUN.PLK	15-12-2021	Drs. HERWIN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
39	36/G/2021/PTUN.PLK	31-12-2921	1. SAPERIL Bin M. TAYIB; 2. SYAHRUL Bin M. TAYAB; 3. NURSARI Bin M. TAYIB; 4. MEGAWATI Bin M. TAYIB; 5. MASNI YATI Bin TAYIB	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN BARAT

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Perkara Banding yang diajukan pada Tahun 2021 : 17 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
01	27/G/2020/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)** MUNARI **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DODDY WONGSO **(TII.INT)**	08-03-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DODDY WONGSO **(TII.INT)**
02	28/G/2020/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)** LAOSMA PURBA **MELAWAN** BUPATI SERUYAN	23-03-2921	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
03	31/G/2020/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)** JHON KENEDY **MELAWAN** - BUPATI BARITO UTARA; - ALI SUPERJAN **(TII.INT)**	13-04-2021	- BUPATI BARITO UTARA; - ALI SUPERJAN **(TII.INT)**	JHON KENEDY
04	2/G/2021/PTUN.PLK **(PERIZINAN)** CV. GRAHA TEKNIK diwakili ISTI SU'ILAH **MELAWAN** KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	11-05-2021	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	CV. GRAHA TEKNIK diwakili ISTI SU'ILAH
05	5/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)** WANCINO **MELAWAN** BUPATI KATINGAN	17-05-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
06	3/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)** Drs. SANGGUL **MELAWAN** BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	18-05-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	Drs. SANGGUL
07	1/G/TF/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	21-05-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKA MARA 2. LURAH MENDAWAI

	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI **MELAWAN** 1. BUPATI SUKA MARA 2. LURAH MENDAWAI			
08	4/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)** NIBEL, S.Sos **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DEDY SATRIA **(TII.INT)**	29-06-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DEDY SATRIA **(TII.INT)**
09	10/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)** GELLI P. MANAN **MELAWAN** PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU	22-07-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU
10	11/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)** IBEN DM, SE **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	10-08-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	IBEN DM, SE
11	13/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)** 1. NAOMI KRISTIANIGSIH 2. EKA RAHMAWATI **MELAWAN** KEPALA DESA LAGAN	25-08-2021	1. NAOMI KRISTIANIGSIH 2. EKA RAHMAWATI	KEPALA DESA LAGAN
12	14/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)** 1. DARYONO 2. SALAMIAH **MELAWAN** KEPALA DESA BATUAH	25-08-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
13	16/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)** 1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRANI. **MELAWAN** KEPALA DESA LIANG NAGA	03-09-2021	KEPALA DESA LIANG NAGA	1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRANI.

14	12/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)** HARLISON **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR	07-09-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
15	22/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)** RENY FERI SULASTRI **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	15-09-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RENY FERI SULASTRI
16	26/G/2021/PTUN.PLK **(PERANGKAT DESA)** 1. SUWENDIE; 2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADO MINGGUS; 5. GENDRI; 6. IMBO **MELAWAN** KEPALA DESA PAHAWAN	01-10-2021	1. SUWENDIE; 2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADO MINGGUS; 5. GENDRI; 6. IMBO	KEPALA DESA PAHAWAN
17	25/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)** Dra. ADJIN WIDEN, SH **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA RUSLI **(TII Int)**	28-10-2021	RUSLI **(TII Int)**	Dra. ADJIN WIDEN, SH

- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Perkara Kasasi yang diajukan pada tahun 2021 : 13 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
01	10/G/2020/PTUN.PLK Jo. 261/B/2020/PT.TUN.JKT **(DESA)** WANCINO **MELAWAN** - BUPATI KATINGAN - EMAN **(TII INT)**	13-01-2021	WANCINO	- BUPATI KATINGAN - EMAN **(TII INT)** **Catatan :** **Ps. 45 A. Berkas Tidak Dikirim Penetapan Tgl 15-02-2021**
02	11/G/2020/PTUN.PLK Jo. 303/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** SUHANDI **MELAWAN**	10-02-2021	SUHANDI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI **(TII INT)**

	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI **(TII INT).**			
03	32/G/2019/PTUN.PLK. **Jo.** 279/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** ERWIN BARUS. DKK **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR; - PT. PERTAMINA PERSERO **(T II INT)**	18-02-2021	ERWIN BARUS. DKK	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR; - PT. PERTAMINA PERSERO **(T II INT)** **Catatan :** **Berkas dikembalikan, tanggal 24 Mei 2021 Ps. 46 (tenggang waktu)**
04	17/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 22/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERIJINAN)** PT. PADANG MULIA **MELAWAN** BUPATI BARITO TIMUR	20-04-2021	PT. PADANG MULIA	BUPATI BARITO TIMUR
05	19/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 22/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERIJINAN)** PT. PADANG MULIA **MELAWAN** - BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA **(TII.INT)**	20-04-2021	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA **(TII.INT)**
06	20/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 32/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERIJINAN)** PT. PADANG MULIA **MELAWAN** - BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA **(TII.INT)**	11-05-2021	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA **(TII.INT)**
07	15/G/KI/2021/PTUN.PLK. **(KOMISI INFORMASI)** KANTOR PERTANAHAN KAB. KAPUAS **MELAWAN** KELOMPOK TANI SIMPEI	05-08-2021	KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI	KANTOR PERTANAHAN KAB. KAPUAS

	KARUHEI			
08	20/G/KI/2021/PTUN.PLK. **(KOMISI INFORMASI)** BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR **MELAWAN** PEMANTAU KEUANGAN NEGARA	10-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
09	31/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 110/B/2021/PT.TUN.JKT **(LAIN-LAIN)** JHON KENEDY **MELAWAN** - BUPATI BARITO UTARA; - CAMAT LAHEI	19-08-2021	- BUPATI BARITO UTARA; - CAMAT LAHEI	JHON KENEDY
10	19/G/KI/2021/PTUN.PLK. **(KOMISI INFORMASI)** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS **MELAWAN** 1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA;	20-08-2021	1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA;	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS
11	18/G/KI/2021/PTUN.PLK. **(KOMISI INFORMASI)** PEMANTAU KEUANGAN NEGARA **MELAWAN** BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	26-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
12	21/G/KI/2021/PTUN.PLK. **(KOMISI INFORMASI)** BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR **MELAWAN** PEMANTAU KEUANGAN NEGARA BUPATI	26-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
13	2/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 153/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERIJINAN)** CV. GRAHA TEHNIK **MELAWAN** KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	05-10-2021	CV. GRAHA TEHNIK	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Perkara PK yang diajukan pada tahun 2021 : 3 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
1	7/G/2019/PTUN.PLK Jo. 61/B/2019//PT.TUN.JKT Jo. 157 K/TUN/2020 **(PERTANAHAN)** ANDREAS, S.T.,M.T **MELAWAN** GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	29-03-2021	ANDREAS, S.T.,M.T	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2	20/G/2019/PTUN.PLK Jo. 33/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 353 K/TUN/2020 **(PERTANAHAN)** MUCHAMAT JAINURI **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	30-03-2021	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
3	16/G/2021/PTUN.PLK Jo. 235/B/2021/PT.TUN.JKT **(DESA)** 1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRAN; **MELAWAN** KEPALA DESA LIANG NAGA	29-12-2021	1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRAN;	KEPALA DESA LIANG NAGA

B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah sisa perkara yang diputus : 4 Perkara**

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	24/G/2020/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	07-01-2021	*01. HIDEN;* *02. DOLE;* *03. UHING;* *04. DEWI;* *05. RUSIANA;* *06. BAHING;* *07. UNYE SAPIA;* *08. INYOK;* *09. LUHING;* *10. RUSLIYA*	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR ***Catatan :*** ***Tidak mengajukan upaya banding***

02	27/G/2020/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	23-02-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DODDY WONGSO (TII.INT).
03	28/G/2020/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	04-03-2021	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
04	31/G/2020/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	01-04-2021	JHON KENEDY	1. BUPATI BARITO UTARA; 2. ALI SUPERJAN **(TII.INT).**

- **Jumlah perkara yang diputus tepat waktu : 28 perkara**

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	1/P/FP/2021/PTUN.PLK **(PERMOHONAN)**	01-02-2021	EFFENDI BUHING	BUPATI LAMANDAU
02	2/P/FP/2021/PTUN.PLK **(PERMOHONAN)**	04-02-2021	ISLIA LILIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
03	3/P/FP/2021/PTUN.PLK **(PERMOHONAN)**	04-02-2021	ANDRY KP. YUNI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
04	8/G/2021/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	04-03-2021	ALIANSI MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI JUJUR DAN ADIL	1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (KPU); 2. BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; **<u>Keterangan</u> :** **- Dismissal tgl. 4-3-2021;** **- Tidak ada upaya perlawanan;**
05	2/G/2021/PTUN.PLK **(PERIJINAN)**	28-04-2021	CV. GRAHA TEKNIK diwakili ISTI SU'ILAH	KEPELA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
06	1/G/TF/2021/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	29-04-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI, SUKAMARA

07	3/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	05-05-2021	Drs. SANGGUL, MT	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
08	5/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	06-05-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
09	7/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	09-06-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
10	4/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	16-06-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DEDY SATRIA
11	10/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)**	08-07-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU
12	11/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)**	22-07-2021	IBEN DM, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
13	15/G/KI/2021/PTUN.PLK	29-07-2021	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEN
14	20/G/KI/2021/PTUN.PLK	29-07-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
15	18/G/KI/2021/PTUN.PLK	05-08-2021	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
16	21/G/KI/2021/PTUN.PLK	05-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)
17	19/G/KI/2021/PTUN.PLK	09-08-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS	1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA
18	13/G/2021/PTUN.PLK	12-08-2021	1. NAOMI KRISTIANINGSIH; 2. EKA RAHMAWATI SURYANI	KEPALA DESA LAGAN

19	14/G/2021/PTUN.PLK	12-08-2021	1. DARYONO; 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
20	12/G/2021/PTUN.PLK	19-08-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
21	24/G/KI/2021/PTUN.PLK	24-08-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
22	16/G/2021/PTUN.PLK	02-09-2021	1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRANI;	KEPALA DESA LIANG NAGA
23	17/G/2021/PTUN.PLK	02-09-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA
24	22/G/2021/PTUN.PLK	08-09-2021	RENY FERI SULASTRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
25	26/G/2021/PTUN.PLK	29-09-2021	1. SUWENDIE; 2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADOMING GUS; 5. GENDRI; 6. IMBO.	KEPALA DESA PAHAWAN
26	25/G/2021/PTUN.PLK	26-10-2021	Dra. ADJIN WIDEN, SH	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA. - RUSLI (**T II INT**).
27	27/G/2021/PTUN.PLK	28-10-2021	1. ARISANDI ABEL; 2. KHRIS SUHARTA.	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - 1. MANJUNG; 2. RUDI KURNIASYAH; 3. MUHAMMAD GETSON; 4. YANUDIN; 5. REMA; 6. RUSMALA; 7. DINE APIL; 8. HARDIATIE; 9. GUNAWAN; **(T II INT I - IX)**
28	29/G/2021/PTUN.PLK	09-12-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK**

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Tahun 2021 : 5 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	24/G/2020/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	07-01-2021	01. HIDEN; 02. DOLE; 03. UHING; 04. DEWI; 05. RUSIANA; 06. BAHING; 07. UNYE SAPIA; 08. INYOK; 09. LUHING; 10. RUSLIYA	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
02	7/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	09-06-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
03	17/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)**	02-09-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA
04	27/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	28-10-2021	3. ARISANDI ABEL; 4. KHRIS SUHARTA.	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - 1. MANJUNG; 2. RUDI KURNIASYAH; 3. MUHAMMAD GETSON; 4. YANUDIN; 5. REMA; 6. RUSMALA; 7. DINE APIL; 8. HARDIATIE; 9. GUNAWAN; **(T II INT I - IX)**
05	29/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	09-12-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Tahun 2021 : 18 perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
01	15/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 324/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** HENDRIYONO **MELAWAN** KEPALA DESA TURA	08-01-2021	KEPALA DESA TURA	HENDRIYONO
02	13/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 322/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** SINDUN **MELAWAN** KEPALA DESA TURA	12-01-2021	KEPALA DESA TURA	SINDUN
03	12/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 331/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** 1. FAUZI KESUMA; 2. ANDI SETYO MARGONO; 3. NYAMIN; **MELAWAN** 1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI **(TII.INT I)**; b. NONOK AGUS HARIANTO **(TII.INT II)**; c. ABDUL ROHIM **(TII.INT III)**;	01-02-2021	1. FAUZI KESUMA; 2. ANDI SETYO MARGONO; 3. NYAMIN;	1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI **(TII.INT I)**; b. NONOK AGUS HARIANTO **(TII.INT II)**; c. ABDUL ROHIM **(TII.INT III)**;
04	14/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 323/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** MISTORI **MELAWAN** KEPALA DESA TURA	03-02-21	KEPALA DESA TURA	MISTORI
05	18/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 11/B/2021/PT.TUN.JKT **(KEPEGAWAIAN)** RITA PERMATASARI, STr.Keb **MELAWAN** BUPATI KATINGAN	12-04-2021	BUPATI KATINGAN	RITA PERMATASARI, STr.Keb ***Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi***
06	27/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 77/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** MUNARI	04-05-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO

	MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO **(TII.INT)**			**(TII.INT)** ***Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi***
07	24/G/KI/2021/PTUN.PLK	24-08-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
08	28/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 82/B/2021/PT.TUN.JKT **(KEPEGAWAIAN)** LAOSMA PURBA **MELAWAN** BUPATI SERUYAN	28-06-2021	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN ***Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi***
09	5/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 162/B/2021/PT.TUN.JKT **(KEPEGAWAIAN)** WANCINO **MELAWAN** BUPATI KATINGAN	26-08-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN ***Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi***
10	1/G/TF/2021/PTUN.PLK **Jo.** 136/B/TF/2021/PT.TUN.JKT **(LAIN-LAIN)** Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI **MELAWAN** 1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI	09-09-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI
11	4/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 196/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** NIBEL, S.Sos **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DEDY SATRIA (**TII.INT**)	13-10-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DEDY SATRIA (**TII.INT**)
12	10/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 188/B/2021/PT.TUN.JKT **(DESA)** GELLI P. MANAN **MELAWAN** PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN	14-10-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN

13	11/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 204/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** IBEN DM, SE **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	15-11-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	IBEN DM, SE ***Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi***
14	16/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 235/B/2021/PT.TUN.JKT **(DESA)** 1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRAN; **MELAWAN** KEPALA DESA LIANG NAGA	02-12-2021	KEPALA DESA LIANG NAGA	1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRAN;
15	14/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 248/B/2021/PT.TUN.JKT **(DESA)** 1. DARYONO 2. SALAMIAH **MELAWAN** KEPALA DESA BATUAH	13-12-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
16	12/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 234/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** HARLISON **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR	13-12-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
17	22/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 236/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** RENY FERI SULASTRI **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	14-12-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RENY FERI SULASTRI
18	25/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 282/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** Dra. ADJIN WIDEN, SH **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - RUSLI **(TII Int)**	20-12-2021	- RUSLI **(TII Int)**	Dra. ADJIN WIDEN, SH

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2021 : 36 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT, PEMBANDING, PEMOHON KASASI	TERGUGAT, TERBANDING, TERMOHON KASASI
01	24/G/2020/PTUN.PLK **(LAIN-LAIN)**	07-01-2021	01. HIDEN; 02. DOLE; 03. UHING; 04. DEWI; 05. RUSIANA; 06. BAHING; 07. UNYE SAPIA; 08. INYOK; 09. LUHING; 10. RUSLIYA	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
02	7/G/2021/PTUN.PLK **(KEPEGAWAIAN)**	09-06-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
03	17/G/2021/PTUN.PLK **(DESA)**	02-09-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA
04	27/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	28-10-2021	1. ARISANDI ABEL; 2. KHRIS SUHARTA.	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - 1. MANJUNG; 2. RUDI KURNIASYAH; 3. MUHAMMAD GETSON; 4. YANUDIN; 5. REMA; 6. RUSMALA; 7. DINE APIL; 8. HARDIATIE; 9. GUNAWAN; **(T II INT I - IX)**
05	29/G/2021/PTUN.PLK **(PERTANAHAN)**	09-12-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
06	15/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 324/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** HENDRIYONO **MELAWAN** KEPALA DESA TURA	08-01-2021	KEPALA DESA TURA	HENDRIYONO
07	13/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 322/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** SINDUN **MELAWAN** KEPALA DESA TURA	12-01-2021	KEPALA DESA TURA	SINDUN
08	12/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.**	01-02-2021	4. FAUZI KESUMA; 5. ANDI SETYO	1. KEPALA DESA

	331/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** 4. FAUZI KESUMA; 5. ANDI SETYO MARGONO; 6. NYAMIN; **MELAWAN** 1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI (**TII.INT I**); b. NONOK AGUS HARIANTO (**TII.INT II**); c. ABDUL ROHIM (**TII.INT III**);		MARGONO; 6. NYAMIN;	KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI (**TII.INT I**); b. NONOK AGUS HARIANTO (**TII.INT II**); c. ABDUL ROHIM (**TII.INT III**);
09	14/G/2020/PTUN.PLK. **Jo.** 323/B/2020/PT.TUN.JKT **(PERANGKAT DESA)** MISTORI **MELAWAN** KEPALA DESA TURA	03-02-21	KEPALA DESA TURA	MISTORI
10	18/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 11/B/2021/PT.TUN.JKT **(KEPEGAWAIAN)** RITA PERMATASARI, STr.Keb **MELAWAN** BUPATI KATINGAN	12-04-2021	BUPATI KATINGAN	RITA PERMATASARI, STr.Keb
11	27/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 77/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** MUNARI **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO (**TII.INT**)	04-05-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO (**TII.INT**)
12	24/G/KI/2021/PTUN.PLK	24-08-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
13	28/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 82/B/2021/PT.TUN.JKT **(KEPEGAWAIAN)** LAOSMA PURBA **MELAWAN** BUPATI SERUYAN	28-06-2021	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN

14	5/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 162/B/2021/PT.TUN.JKT **(KEPEGAWAIAN)** WANCINO **MELAWAN** BUPATI KATINGAN	26-08-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
15	1/G/TF/2021/PTUN.PLK **Jo.** 136/B/TF/2021/PT.TUN.JKT **(LAIN-LAIN)** Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI **MELAWAN** 3. BUPATI SUKAMARA; 4. LURAH MENDAWAI	09-09-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI
16	4/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 196/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** NIBEL, S.Sos **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DEDY SATRIA **(TII.INT)**	13-10-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DEDY SATRIA **(TII.INT)**
17	10/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 188/B/2021/PT.TUN.JKT **(DESA)** GELLI P. MANAN **MELAWAN** PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN	14-10-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN
18	11/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 204/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** IBEN DM, SE **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	15-11-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	IBEN DM, SE

19	14/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 248/B/2021/PT.TUN.JKT **(DESA)** 1. DARYONO 2. SALAMIAH **MELAWAN** KEPALA DESA BATUAH	13-12-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
20	12/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 234/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** HARLISON **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR	13-12-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
21	22/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 236/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** RENY FERI SULASTRI **MELAWAN** KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	14-12-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RENY FERI SULASTRI
22	25/G/2021/PTUN.PLK **Jo.** 282/B/2021/PT.TUN.JKT **(PERTANAHAN)** Dra. ADJIN WIDEN, SH **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - RUSLI **(TII Int)**	20-12-2021	- RUSLI **(TII Int)**	Dra. ADJIN WIDEN, SH
23	19/G/2019/PTUN.PLK Jo. 28/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 349 K/TUN/2020 **(KEPEGAWAIAN)** PIRI AHADI **MELAWAN** BUPATI SUKAMARA	14-09-2020	PIRI AHADI	BUPATI SUKA MARA **Catatan :** Berkas diterima tanggal 04-01-2021
24	21/G/2019/PTUN.PLK Jo. 72/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 479 K/TUN/2020 **(KEPEGAWAIAN)** H. MALIK MULIAWAN, SH **MELAWAN** BUPATI BARITO UTARA	14-10-2020	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA **Catatan :** Berkas diterima tanggal 04-01-2021
25	24/G/2019/PTUN.PLK Jo. 113/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 528 K/TUN/2020 **(PERTANAHAN)**	24-11-2020	NOORYANIE DARHAMSYAH	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - MENTERI KEUANGAN RI **(TII INT)**

	NOORYANIE DARHAMSYAH **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - MENTERI KEUANGAN RI (**TII INT**)			**Catatan :** Berkas diterima tanggal 08-02-2021
26	16/G/2019/PTUN.PLK Jo. 19/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 372 K/TUN/2020 **(KEPEGAWAIAN)** LELO ANGGORO, S.STP.,MAP **MELAWAN** WALIKOTA PALANGKA RAYA	28-09-2020	LELO ANGGORO, S.STP.,MAP	WALIKOTA PALANGKA RAYA **Catatan :** Berkas diterima tanggal 29-03-2021
27	22/G/2019/PTUN.PLK Jo. 112/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 521 K/TUN/2020 **(PERIJINAN)** PT. GAUNG ALAM SEMESTA **MELAWAN** BUPATI KATINGAN	24-11-2020	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	BUPATI KATINGAN **Catatan :** Berkas diterima tanggal 23-04-2021
28	27/G/2019/PTUN.PLK Jo. 134/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 541 K/TUN/2020 **(KEPEGAWAIAN)** Drs. DAGUT, SH.,MT **MELAWAN** GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	08-12-2020	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH **Catatan :** Berkas diterima tanggal 05-05-2021
29	18/G/2019/PTUN.PLK Jo. 27/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 393 K/TUN/2020 **(KEPEGAWAIAN)** ANDI JAYANDI **MELAWAN** BUPATI SUKAMARA	23-11-2020	ANDI JAYANDI	BUPATI SUKAMARA **Catatan :** Berkas diterima tanggal 08-07-2021
30	5/G/2019/PTUN.PLK Jo. 259/B/2019/PT.TUN.JKT Jo. 124 K/TUN/2020 **(PERTANAHAN)** Hj. HAIMAH **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - MAULIDA (**TII INT**)	16-04-2020	MAULIDA **(TII.INT)**	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - Hj. HAIMAH **(PENGGUGAT)** **Catatan :** Berkas diterima tanggal 15-11-2021
31	31/G/2019/PTUN.PLK **Jo.** 215/B/2020/PT.TUN.JKT **Jo.** 139 K/TUN/2021	01-04-2021	ARMAN MUIS	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - PEMERINTAH KOTA

	(PERTANAHAN) ARMAN MUIS **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA			PALANGKA RAYA
32	23/G/KI/2020/PTUN.PLK Jo. 133 K/TUN/2021 (KI) NORLITA FEBRIANI MELAWAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA	30-03-2021	NORLITA FEBRIANI	KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
33	26/G/2019/PTUN.PLK **Jo.** 151/B/2020/PT.TUN.JKT **Jo.** 55 K/TUN/2021 **(DESA)** TATI, S.PD **MELAWAN** 1. BUPATI KAPUAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG KAMPIN KECAMATAN PASAK TALAWANG, KABUPATEN KAPUAS; ASON.	02-02-2021	TATI, S.PD	1. BUPATI KAPUAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG KAMPIN KECAMATAN PASAK TALAWANG, KABUPATEN KAPUAS; 3. ASON.
34	11/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 303/B/2020/PT.TUN.JKT **Jo.** 192 K/TUN/2021 **(PERTANAHAN)** SUHANDI **MELAWAN** - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWIRINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI **(TII INT)**	02-06-2021	SUHANDI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWIRINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI **(TII INT)**
35	9/G/2020/PTUN.PLK **Jo.** 260/B/2020/PT.TUN.JKT **Jo.** 227 K/TUN/2021 **(PERTANAHAN)** TOMMY TANUWIDJAJA	22-07-2021	- TRI DARTAHENA, SH.,M.Kn KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	TOMMY TANUWIDJAJA

	MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR; - TRI DARTAHENA (**TII INT**).			
36	19/G/2020/PTUN.PLK Jo. 23/B/2021/PT.TUN.JKT Jo. 343 K/TUN/2021 **(PERIZINAN)** PT. PADANG MULIA **MELAWAN** - BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (**TII INT**)	21-09-2021	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (**TII INT**)

- **Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi**
- **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi**

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. POSBAKUM

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tahun Anggaran 2021 pagu anggaran untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 38.500.000,- selama 1 Tahun melalui Kegiatan Pos Bantuan Hukum untuk Layanan Pengamanan Sidang sebesar Rp. 2.500.000,- dan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 33.000.000,- dan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000.000,- . Realisasi anggaran ini pada tahun 2021 sebesar Rp. 33.000.000,- atau 85,71% dari pagu DIPA. Untuk Jasa Konsultan Hukum menggunakan Jasa Peradi sebagai Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum.

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

3. PERKARA PRODEO

Didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tahun Anggaran 2021 pagu anggaran untuk Perkara Prodeo sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 3 Perkara melalui Kegiatan Penyelesaian Perkara Prodeo untuk Biaya Perkara Prodeo. Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 0,- atau 0% dari pagu. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang didaftarkan sehingga anggaran yang ada tidak dipakai.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021 berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.	Ketua	
2	H. Al'an Basyier, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	Hakim Pratama Madya	
4	Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.	Hakim Pratama Madya	
5	Dita Dwi Arisandi, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	
6	Maryam Nur Hidayati, S.H.	Hakim Pratama	
7	Sekar Annisa, S.H.	Hakim Pratama	
	KEPANITERAAN		
8	Ari Prabowo, S.H., M.H.	Panitera	
9	Patar Sipahutar,S.H	Panitera Muda Perkara	
10	Rusmini Siagian, S.H	Panitera Muda Hukum	
11	Inggrid Bintang Nursanny,S.H	Panitera Pengganti	
12	Fardhiana Resdhianti Muldijaningrum,S.H	Panitera Pengganti	
13	Hernadi Natanael, S.H	Panitera Pengganti	
14	Dayu Setia Nugraha, S.H.	Analis Perkara Peradilan/Staf Kepaniteraan Perkara	
15	Vita Seh Ukurta Br Tarigan, A.Md.	Pengadministrasi Register Perkara	
	KESEKRETARIATAN		
16	Heru Pamungkas, S.T.	Sekretaris	
17	Saleha, S.E	Kasub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	
18	Pusphitaria Bambang Pardjo, S.Pd., S.H	Kasub Bag. Kep., Organisasi, dan Tata Laksana	
19	Wiwik Krisnawati. S.Kom	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	
20	Supriansyah, S.H	Penyusun Laporan Keuangan/Staf Umum dan Keuangan	
21	Sulimargos Manalu, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama/CPNS	
	TENAGA PPNPN		
22	Ewilistari, S.H	PPNPN / Pramubhakti	
23	Yorgen, S.Pd	PPNPN / Satpam	
24	Henfrandika, S.H	PPNPN / Pramubhakti	
25	Apriannor, S.E	PPNPN / Pramubhakti	
26	Dadi Gara	PPNPN / Supir	
27	Leong Sonsin	PPNPN / Satpam	
28	Dedi Respati	PPNPN / Pramubhakti	
29	Mareh Dayanu, S.Kom	PPNPN / Supir	
30	Budiono	PPNPN / Satpam	
31	M. Rizal Abidin	PPNPN / Satpam	

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
BERDASARKAN PERMA Nomor 7 TAHUN 2015

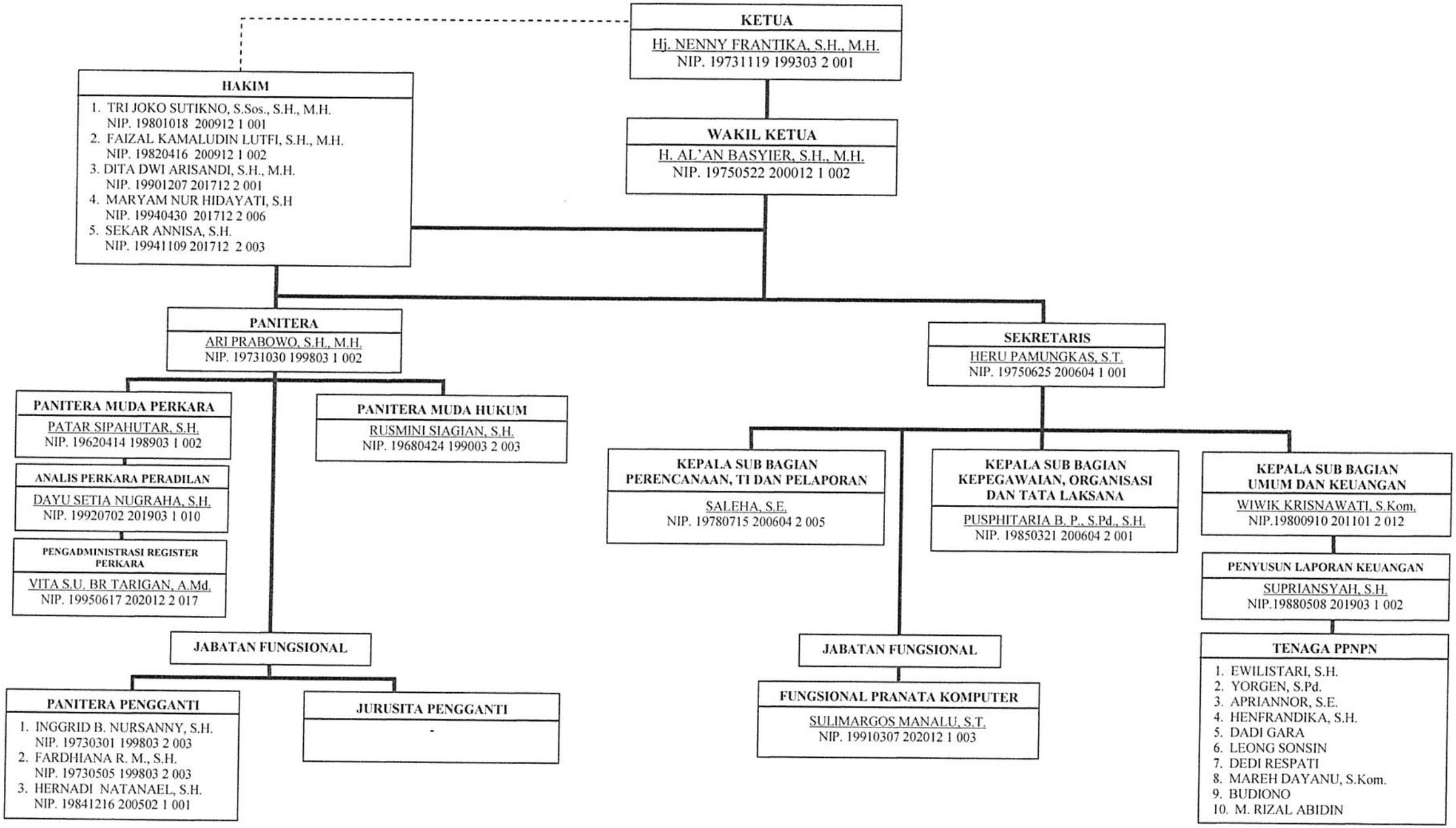

TENAGA TEKNIS HAKIM				
1		Nama	:	Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
		NIP	:	19731119 199303 2 001
		Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
		Jabatan	:	Ketua/Hakim Madya Utama
2		Nama	:	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.
		NIP	:	19750522 200012 1 001
		Pangkat/Golongan	:	Pembina Tk. I (IV/b)
		Jabatan	:	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda
3		Nama	:	TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.
		NIP	:	19801018 200912 1001
		Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)
		Jabatan	:	Hakim Pratama Madya
4		Nama	:	FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., M.H.
		NIP	:	19820416 200912 1 002
		Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)
		Jabatan	:	Hakim Pratama Madya
5		Nama	:	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.
		NIP	:	19901207 201712 2 001
		Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
		Jabatan	:	Hakim Pratama Muda
6		Nama	:	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.
		NIP	:	19940430 201712 2 006
		Pangkat/Golongan	:	Penata Muda (III/a)
		Jabatan	:	Hakim Pratama
7		Nama	:	SEKAR ANNISA, S.H.
		NIP	:	19941109 201712 2 003
		Pangkat/Golongan	:	Penata Muda (III/a)
		Jabatan	:	Hakim Pratama

TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN				
1		Nama	:	ARI PRABOWO, S.H., M.H.
		NIP	:	19731030 199803 1002
		Pangkat/Golongan	:	Pembina (IV/a)
		Jabatan	:	Panitera
3		Nama	:	PATAR SIPAHUTAR, S.H.
		NIP	:	19620414 198903 1 002
		Pangkat/Golongan	:	Penata TK I (III/d)
		Jabatan	:	Panitera Muda Perkara
4		Nama	:	RUSMINI SIAGIAN, S.H.
		NIP	:	19680424 199003 2 003
		Pangkat/Golongan	:	Penata TK I (III/d)
		Jabatan	:	Panitera Muda Hukum
5		Nama	:	INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
		NIP	:	19730301 199803 2 003
		Pangkat/Golongan	:	Penata TK I (III/d)
		Jabatan	:	Panitera Pengganti
6		Nama	:	FARDHIANA RESDHIANTI MUDIJANINGRUM, S.H.
		NIP	:	19730505 199803 2 003
		Pangkat/Golongan	:	Penata TK I (III/d)
		Jabatan	:	Panitera Pengganti
7		Nama	:	HERNADI NATANAEL, S.H.
		NIP	:	19841216 200502 1001
		Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)
		Jabatan	:	Panitera Pengganti

TENAGA NON TEKNIS PEJABAT STRUKTURAL				
1		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	HERU PAMUNGKAS, S.T. 19750625 200604 1 001 Pembina (IV/a) Sekretaris
2		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	SALEHA, S.E. 19780715 200604 2 005 Penata TK. I (III/d) Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
3		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H. 19850321 200604 2 001 Penata (III/c) Kasub Bag.Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
4		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom 19800910 201101 2 012 Penata (III/c) Kasub Bag. Umum dan Keuangan

TENAGA NON TEKNIS STAF				
1		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	SUPRIANSYAH, S.H. 19880508 201903 1 002 Penata Muda (III/a) Penyusun Laporan Keuangan
2		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	DAYU SETIA NUGRAHA, S.H. 19920702 201903 1 010 Penata Muda (III/a) Analis Perkara Peradilan/Jurusita Pengganti
3		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	SULIMARGOS, S.T. 19910307 202012 1 003 Penata Muda (III/a) Pranata Komputer Ahli Pertama/CPNS
4		Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : : :	VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md 19950617 202012 2 017 Pengatur (II/c) Pengadministrasi Register Perkara/CPNS

TENAGA PPNPN				
1		Nama Jabatan	: :	EWILISTARI, S.H Pramubakti / diperbantukan di Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
2		Nama Jabatan	: :	YORGEN, S.Pd Satpam / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
3		Nama Jabatan	: :	HENFRANDIKA, S.H Pramubakti / diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Hukum
4		Nama Jabatan	: :	APRIANNOR, S.E. Pramubakti / diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Perkara
5		Nama Jabatan	: :	DADY GARA Sopir/ diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan/PTSP
6		Nama Jabatan	: :	LEONG SONSIN Satpam / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
7		Nama Jabatan	: :	DEDI RESPATI Pramubakti / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan/PTSP
8		Nama Jabatan	: :	MAREH DAYANU, S.Kom Sopir / diperbantukan di Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
9		Nama Jabatan	: :	BUDIONO Satpam/ diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
10		Nama Jabatan	: :	M. RIZAL ABIDIN Satpam / diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan

1. **Mutasi**

Pada Tahun 2021 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terdapat Mutasi Keluar dan Mutasi Masuk :

- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : 50/DjMT/KEP/2/2021 tanggal 26 Fenruari 2021 Tentang Pemindahan dan/atau Pengangkatan Pengangkatan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Keluar

- **CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.** NIP. 19731118 199303 1 001 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi pada tanggal 05 Mei 2021 sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Mutasi Masuk

- **ARI PRABOWO, S.H., M.H.** NIP. 19731030 199803 1 002 Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan Pelantikan tanggal 06 Mei 2021 sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

- Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134/KMA/SK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pemindahan Dan/Atau Pengangkatan Dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Keluar

terdiri atas Wakil Ketua dan 2 (dua) orang Hakim

1) **ANDRY ASANI, S.H., M.H.,** NIP. 19710409 199603 1 001 Hakim Madya Muda/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi tanggal 20 Agustus 2021 sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
2) **MOHAMAD YUSUP, S.H.,** NIP. 19821002 200904 1 008 Hakim Pratama Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi tanggal 16 Agustus 2021 sebagai Hakim Yustisial sebagai Asisten pada Mahkamah Agung RI.
3) **FRANS CH. SUBROTO, S.H.** NIP. 19860525 200912 1 006 Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mutasi tanggal 09 Desember 2021 sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Mutasi Masuk terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua

1) **Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.** NIP. 19731119 199303 2 001 Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang TMT Jabatan tanggal 10 Agustus 2021 sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

2) **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.** NIP. 19750522 200012 1 002 Hakim Madya Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Manado TMT Jabatan tanggal 01 September 2021 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 584/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 tanggal 17 September 2021 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Keluar

- **ADITYA APRIZA, S.H.** NIP. 19840422 200904 1 004 Panitera Pengganti Palangka Raya mutasi pada tanggal 26 November 2021 sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

2. Promosi

Tidak terdapat Promosi Jabatan Struktural/Fungsional pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

3. Pensiun

Tidak terdapat Hakim dan Pejabat Struktural/Fungsional yang Pensiun pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1174/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkunngan Mahkamah Agung RI atas nama :
  - **SULIMARGOS MANALU, S.T.** NIP. 19910307 202012 1 003 Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Tanggal Melaksanakan Tugas tanggal 26 Januari 2021.
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1173/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkunngan Mahkamah Agung RI atas nama :
  - **VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md,** NIP. 19950617 202012 2 017 Jabatan Pengadministrasi Register Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Pelantikan tanggal 01 Februari 2021.

4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM Teknis/ Non Teknis

Terdapat 6 (enam) orang Hakim dan 11 (sebelas) orang Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Teknis / Non Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
1.	Maryam Nur Hidayati, S.H.	W2-TUN6/118/KP.10.09/I/2021 Tanggal 08 Januari 2021	Pelatihan Lanjutan TOPEL Preparation Tahun Anggaran 2021
2.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN6/119/KP.10.09/I/2021 Tanggal 08 Januari 2021	Pelatihan Lanjutan TOPEL Preparation Tahun Anggaran 2021
3.	Frans CH. Subroto, S.H.	W2-TUN7/154/KP.10.09/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 5B T.A 2021
4.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	W2-TUN7/158/KP.10.09/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 10A T.A 2021
5.	Maryam Nur Hidayati, S.H.	W2-TUN7/155/KP.10.09/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Putusan Pengadilan (Executive Summary) T.A 2021
6.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN7/156/KP.10.09/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Putusan Pengadilan (Executive Summary) T.A 2021
7.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN7/157/KP.10.09/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Putusan Pengadilan (Executive Summary) T.A 2021
8.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN7/235/KP.10.09/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021	Pelatihan Online Efektivitas Pribadi Tahun 2021
9.	Wiwik Krisnawati, S.Kom.	W2-TUN7/236/KP.10.09/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021	Pelatihan Online Public Speaking And Effektive Communication skill Tahun 2021
10.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN7/234/KP.10.09/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021	Pelatihan Online Ilmu Jurnalistik

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
11.	Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.	W2-TUN7/251/KP.10.09/II/2021 Tanggal 18 Februari 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia
12.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN7/252/KP.10.09/II/2021 Tanggal 18 Februari 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia
13.	Wiwik Krisnawati, S.Kom.	W2-TUN7/296/KP.10.09/II/2021 Tanggal 24 Februari 2021	Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang I Angkatan V Tahun 2021
14.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN7/293/KP.10.09/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021	Pelatihan Online Basic Video Production 09 dan 10 Tahun 2021
15.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN6/291/KP.10.09/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021	Pelatihan Online English Effektive Writing Batch 3 Kelas 5 Tahun 2021
16.	Maryam Nur Hidayati, S.H.	W2-TUN6/292/KP.10.09/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021	Pelatihan Online English Effektive Writing Batch 3 Kelas 5 Tahun 2021
17.	Frans CH. Subroto, S.H.	W2-TUN7/294/KP.10.09/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021	Bimtek Persidangan Secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan TUN
18.	Maryam Nur Hidayati, S.H.	W2-TUN6/295/KP.10.09/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021	Pelatihan Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Karya Bagi Hakim Lingkungan Peradilan TUN
19.	Vita Seh Ukurta Br Tarigan, A.Md	W2-TUN6/324/KP.10.09/III/2021 Tanggal 02 Maret 2021	Bimtek Bahasa Inonesia dalam Bidang Hukum
20.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN6/336/KP.10.09/III/2021 Tanggal 08 Maret 2021	Pelatihan Online Monitoring bagi Mentor Peserta PKP Gelombang I Batch II C Tahun 2021

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
21.	Sulimargos Manalu, S.T.	W2-TUN6/349/KP.10.09/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021	Pelatihan LATSAR Golongan III Angkatan I s.d XII Tahun 2021
19.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN6/352/KP.10.09/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021	Pelatihan Online Economic Analysis Of Law Tahun 2021
20.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN7/348/KP.10.09/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021	Pelatihan Online Public Speaking And Effective Communication Skill
21.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	W2-TUN7/347/KP.10.09/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021	Bimtek Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN
22.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN7/346/KP.10.09/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021	Pelatihan Online Argumentasi Gagasan Pengadilan di Media Massa dari Tempat Tugas
23.	Dita Dwi Arisandi, S.H.	W2-TUN7/353/KP.10.09/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Lingkungan Peradilan TUN Gelombang I Seluruh Indonesia
23.	Andry Asani, S.H., M.H.	W2-TUN7/351/KP.10.09/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021	Pelatihan Singkat Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Terkait Kapita Selekta Permasalahan Perkara Lingkungan Hidup TUN Tahun 2021
24.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN7/361/KP.10.09/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021	Pelatihan Online Basic Vidio Editing Kelas 03 s.d 04 dari Tempat Tugas
25.	Wiwik Krisnawati, S.Kom.	W2-TUN7/376/KP.10.09/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021	Pelatihan Online English Effective Presentation Bagi Peserta PKP Gelombang I Angkatan XVII s.d XXV
26.	Pusphitaria B. Pardjo, S.Pd., S.H.	W2-TUN7/375/KP.10.09/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021	Pelatihan Online English Effective Presentation Bagi Peserta PKP Gelombang I Angkatan XVII s.d XXV

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
27.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	W2-TUN6/402/KP.10.09/IV/2021 Tanggal 7 April 2021	Bimtek Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
28.	Cuncun Da rmajaya, S.H., M.H.	W2-TUN6/402/KP.10.09/IV/2021 Tanggal 7 April 2021	Bimtek Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
29.	Patar Sipahutar, S.H.	W2-TUN6/402/KP.10.09/IV/2021 Tanggal 7 April 2021	Bimtek Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
30.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN7/517/KP.10.09/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII
31.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN7/538/KP.10.09/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d 12 Tahun 2021
32.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN7/551/KP.10.09/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021	Pelatihan Online Manajemen Aset Gelombang II Angkatan IX Tahun 2021
33.	Wiwik Krisnawati, S.Kom.	W2-TUN7/550/KP.10.09/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021	Pelatihan Online Manajemen Aset Gelombang II Angkatan VII Tahun 2021
34.	Sulimargos Manalu, S.T.	W2-TUN7/601/KP.10.09/VI/2021 Tanggal 16 Juni 2021	Pelatihan Online English Effective Presentation Bagi Peserta Latsar CPNS Golongan III
35.	Vita Seh Ukurta Br Tarigan, S.T.	W2-TUN7/645/KP.10.09/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021	Pelatihan LATSAR CPNS Gelombang II Angkatan I s.d XII Tahun 2021
36.	Mohamad Yusup, S.H.	W2-TUN7/517/KP.10.09/V/2021 Tanggal 29 Juni 2021	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIII
37.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	W2-TUN6/666/KP.10.09/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Karya Bagi Hakim Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
38.	Faizal Kamaludin Lutfi., S.H., M.H.	W2-TUN6/667/KP.10.09/VII/2021 Tanggal 5 Juli 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Karya Bagi Hakim Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia
39.	Pusphitaria B. Pardjo, S.Pd., S.H.	W2-TUN6/701/KP.10.09/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021	Bimtek dan Sosialisasi SIKEP, SAPK, MySPAK dan SITARA
40.	Ari Prabowo, S.H.	W2-TUN6/730/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 12
41.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	W2-TUN6/729/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 11
42.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN6/729/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021	Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9
43.	Ari Prabowo, S.H.	W2-TUN7/784/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia
44.	Fardhiana R. Mudijaningrum, S.H.	W2-TUN7/785/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia
45.	Aditya Apriza, S.H.	W2-TUN7/786/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia
46.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN7/ /KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021	Pelatihan Manajemen Laporan Kinerja Gelombang VI Angkatan 21 Tahun 2021
47.	Maryam Nur Hidayati, S.H.	W2-TUN7/798/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021	Bimtek Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan TUN Tahun 2021

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
48.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN7/799/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021	Bimtek Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan TUN Tahun 2021
49.	Faizal Kamaludin Lutfi., S.H., M.H.	W2-TUN6/797/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Militer
50.	Faizal Kamaludin Lutfi., S.H., M.H.	W2-TUN6/797/KP.10.09/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021	Pelatihan Teknis Yudisial Sengkrta Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang bagi Hakim Lingkungan Peradilan TUN seluruh Indonesia
51.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN6/803/KP.05.10/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021	Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Angkatan VIII Tahun 2021
52.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN6/804/KP.05.10/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021	Pelatihan Calon Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Tahun 2021
53.	Faizal Kamaludin Lutfi., S.H., M.H.	W2-TUN6/974/KP.10.09/X/2021 Tanggal 6 Oktober 2021	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV Tahap III bagi Hakim Peradilan Umum, Militer dan TUN Seluruh Indonesia
54.	Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.	186/Djmt/Ratgas/10/2021	Bimtek Upaya Administratif Dalam Pemeriksaan Sengketa TUN Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
55.	Dita Dwi Arisandi, S.H., M.H.	W2-TUN6/991/KP.10.09/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Pelatihan Online Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (Continuing Justice Education) Peradilan TUN Seluruh Indonesia
56.	Maryam Nur Hidayati, S.H.	W2-TUN6/989/KP.10.09/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Pelatihan Online Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (Continuing Justice Education) Peradilan TUN Seluruh Indonesia
57.	Sekar Annisa, S.H.	W2-TUN6/990/KP.10.09/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Pelatihan Online Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (Continuing Justice Education) Peradilan TUN Seluruh Indonesia
58.	Inggrid Bintang Nursanny, S.H.	W2-TUN6/992/KP.10.09/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Pelatihan Online Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Pertama Gelombang II Peradilan TUN Seluruh Indonesia
59.	Hernadi Natanael, S.H.	W2-TUN6/993/KP.10.09/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Pelatihan Online Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Pertama Gelombang II Peradilan TUN Seluruh Indonesia
60.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	W2-TUN6/1021/KP.10.09/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021	Bimtek Pemeriksaan Sengketa Barang/Jasa Pemerintah Bagi Hakim Pengadilan TUN
61.	Faizal Kamaludin Lutfi., S.H., M.H.	W2-TUN6/1022/KP.10.09/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021	Bimtek Pemeriksaan Sengketa Barang/Jasa Pemerintah Bagi Hakim Pengadilan TUN
62.	H. Al'an Basyier, S.H., M.H.	W2-TUN6/1020/KP.10.09/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021	Bimtek Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 di Lingkungan Peradilan Sewilayah Hukum PT.TUN Jakarta
63.	Ari Prabowo, S.H., M.H.	W2-TUN6/1020/KP.10.09/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021	Bimtek Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 di Lingkungan Peradilan Sewilayah Hukum PT.TUN Jakarta

No.	Nama	No. Surat dan Tgl. Surat	Keterangan
64.	Heru Pamungkas, S.T.	W2-TUN6/1020/KP.10.09/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021	Bimtek Sosialisasi Tentang Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021 di Lingkungan Peradilan
65.	Rusmini Siagian, S.H.	W2-TUN6/1040/KP.10.09/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021	Bimtek Pelayanan Disabilitas bagi para Panitera, Sekretaris dan Petugas PTSP di Lingkungan Peradilan TUN
66.	Saleha, S.E.	W2-TUN6/1040/KP.10.09/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021	Bimtek Pelayanan Disabilitas bagi para Panitera, Sekretaris dan Petugas PTSP di Lingkungan Peradilan TUN
67.	Dayu Setia Nugraha, S.H.	W2-TUN6/1040/KP.10.09/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021	Bimtek Pelayanan Disabilitas bagi para Panitera, Sekretaris dan Petugas PTSP di Lingkungan Peradilan TUN
68.	Tri Joko Sutikno, S.Sos., S.H., M.H.	W2-TUN6/1054/KP.10.09/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XV Tahun 2021
69.	Dayu Setia Nugraha, S.H.	W2-TUN6/1189/KP.10.09/XII/2021 Tanggal 15 Desember 2021	Bimtek Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan TUN

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 seperti :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2021 No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial No : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA).

   Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan :

   - ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :
     - ▪ Layanan Perkantoran (1066.EAA.001) dengan sub keluaran :
       - – Gaji dan Tunjangan (001)
       - – Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
     - ▪ Layanan Umum (1066.EAC.003) dengan sub keluaran :
       - – Non Operasional Satker Daerah (052)
   - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.EAD.001) dengan sub keluaran:
  - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (052)

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapa kegiatan :

❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059.BBA) dengan keluaran :
- Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN (1059.BBA.001) dengai sub keluaran :
  - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051).

❖ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1059.QBA) dengan keluaran :
- Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :
  - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (051)
- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.QBA.002) dengan sub keluaran :
  - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA BUA Tahun 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tanggal 23 Nopember 2020** dengan nilai **pagu awal Rp. 4.994.545.000,-** mengalami revisi DIPA sebanyak 4 kali, Sedangkan untuk **DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 dengan nilai pagu Rp. 38.500.000,-**.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sampai pada Revisi ke-4 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2021 tanggal 23 Nopember 2020 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 5.146.470.000,- .

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan :

❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :
- Layanan Perkantoran (1066.EAA.001) dengan sub keluaran :
  - Gaji dan Tunjangan (001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.687.493.000,-.
  - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 1.185.377.000,-.
- Layanan Umum (1066.EAC.003) dengan sub keluaran :
  - Non Operasional Satker Daerah (052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 8.600.000,-.

❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.EAD.001) dengan sub keluaran:

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 265.000.000,-.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 38.500.000,-.

   Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

   ❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059.BBA) dengan keluaran :
      - Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN (1059.BBA.001) dengan sub keluaran :
         - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 2.500.000,- .

   ❖ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1059.QBA) dengan keluaran :
      - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :
         - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 33.000.000,-.
      - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.QBA.002) dengan sub keluaran :
         - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.000.000,-.

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor seperti Belanja Keperluaan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.
3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat ini 23 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 revisi ke 4 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.687.493.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2021 telah menyerap dana sebesar **Rp. 3.415.895.956,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 43,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 271.597.044,- atau sebesar **92,63%** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis pakai untul memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja baran dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.193.977.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilai Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2021 telah menyerap dan DIPA BUA sebesar **Rp. 1.192.263.627,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjad realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 1.713.373,- atau sebesar **99,86%** dari pagu DIP BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingg mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapar belanja barang tersebut terdiri :

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 626.163.000,-atau 99,84% yang terdiri dari belanja :
  - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 545.950.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
  - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 4.400.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
  - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 34.380.000,- atau 97,17% dari pagu DIPA.
  - Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 41.433.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 48.000.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
  - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp. 48.000.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 100.155.618,- atau 99,31% terdiri dari belanja :
  - Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 74.355.790,- atau 99,14% dari pagu DIPA.
  - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 749.828,- atau 93,73% dari pagu DIPA.

- Belanja Langganan Air terserap sebesar Rp. 900.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Sewa Rumah Hakim sebesar Rp. 22.950.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

• Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 358.140.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :

- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp. 198.654.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 33.932.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp. 124.554.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

• Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 24.196.428,- atau 100,00% terdiri dari belanja:

- Belanja Perjalanan Biasa terserap sebesar Rp. 51.645.009,- atau 99,99% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota terserap sebesar Rp. 560.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

• Belanja Barang Non Operasional (5212) terserap sebesar Rp. 8.600.000,-atau 100,00% yang terdiri dari belanja :

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya terserap sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 terserap sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 38.500.000,-, realisasi anggaran **Rp. 33.000.000,-** atau **85,71%** dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena Belanja Pengamanan Sidang tidak ada digunakan dan Belanja penanganan perkara prodeo tidak ada digunakan karena tidak perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tahun Anggaran 2021 terdapat anggaran belanja modal dengan pagu DIPA sebesar Rp. 265.000.000,- dengan realisasi **Rp. 264.980.000,-** atau **99,99%** dari pagu DIPA.

DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2021
PER 31 DESEMBER 2021
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	3.687.493.000,-	3.415.895.956,-	(271.597.044,-)	92,63
2.	Bel. Barang (01)	1.193.977.000	1.192.263.627,-	(1.713.373,-)	99,86
	Bel. Barang (05)	38.500.000,-	33.000.000,-	(5.500.000,-)	85,71
3.	Bel. Modal (01)	265.000.000,-	264.980.000,-	(20.000,-)	99,99
	Jumlah Belanja	5.184. 970.000,-	4.906.139.583,-	(278.830.417,-)	94,62

DAFTAR REALISASI PNBP 2 DIPA PER 31 DESEMBER TAHUN 2021
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	17.107.000,-	13.741.881,-	(3.365.119,-)	80,33
2.	DIPA 05	10.000.000,-	12.681.500,-	2.681.500,-	126,82
	Jumlah	27.107.000,-	26.423.381,-	(683.619,-)	97,48

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksana tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksana pekerjaan antara lain adalah :

1. Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terdiri dari :

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 1.029 M^2.
- 7 buah rumah dinas Hakim yang terdiri dari : 2 buah rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua, dan 6 buah rumah dinas jabatan (Hakim).
- 3 buah Mobil Dinas yang terdiri dari 3 Mobil Dinas semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 9 buah Sepada Motor yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

a). Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2021 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 sampai revisi 4 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 265.000.000;

b). Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman serta Rumah Dinas Rp. 232.586.000;
- Kendaraan Roda 4 Rp. 68.904.000;
- Kendaraan Roda 2 Rp. 32.400.000;
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 23.250.000;
- Langganan Daya Dan Jasa Rp. 100.850.000;

c). Penghapusan

Penghapusan untuk Tahun 2021 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak ada mengusulkan penghapusan.

I. Daftar Inventaris Per 31 Desember 2021 Berupa :

Bangunan

Bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibangun berdasarkan DIP Nomor : 063/XIII/3/-/1995, tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp. 443.200.000,- dan dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

II. Denah bangunan / gedung disertai keterangan adalah :

- Ruang Ketua
  Ukuran = 9 x 4 = 36 M^2
  Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Wakil Ketua
  Ukuran = 9 x 4 = 36 M^2.
  Jumlah Hakim = - Orang
- Ruang Hakim
  Ukuran = 13,5 x 6 = 81 M^2.
  Jumlah Hakim = 4 Orang
- Ruang Panitera
  Ukuran = 3,5 x 6,4 = 22,4 M^2.
  Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
  Ukuran = 4,5 x 5 = 22,5 M^2.
  Jumlah Pegawai = 1 Orang

- Ruang Server

  Ukuran = 4,5 x 5 = 22,5 M^2.

  Jumlah Pegawai = - Orang
- Ruang Panmud Perkara

  Ukuran = 67,5 x 6 = 40,5 M^2.

  Jumlah Pegawai = 5 Orang
- Ruang Panmud Hukum

  Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M^2.

  Jumlah Pegawai = 2 Orang
- Ruang Kepegawaian

  Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M^2.

  Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Umum dan Keuangan

  Ukuran = 6,75 x 6 = 40,5 M^2.

  Jumlah Pegawai = 2 Orang
- Ruang Berkas Perkara

  Ukuran = 5,89 x 3,88 = 22,8 M^2.

  Jumlah Pegawai = - Orang
- Tenaga Honorer

  Jumlah Pegawai = 10 Orang
- Ruang Pemeriksaan Persiapan

  Ukuran = 14 x 6 = 84 M^2.
- Ruang Sidang Utama

  Ukuran = 15 x 10 = 150 M^2.

Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 063/XIII/3/-/1995 tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 443.200.000,-

Bangunan Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 051/XIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996 Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 206.700.000,-

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasarkan DIP Nomor : 085/XIII/14/-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp. 221.464.000,- ;

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, berdasarkan anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan pengadaan sebagai berikut :

a). Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2021 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tanggal 2 Nopember 2020 sampai revisi 4 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 265.000.000;

b). Pemeliharaan

- Gedung-Bangunan dan Halaman dan Rumah Dinas Rp. 232.586.000;
- Kendaraan Roda 4 Rp. 68.904.000;
- Kendaraan Roda 2 Rp. 32.400.000;
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 23.250.000;
- Langganan Daya Dan Jasa Rp. 100.850.000;

c). Penghapusan

Penghapusan untuk tahun 2021 satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak ada mengusulkan penghapusan yang ditujukan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi E-Court di PTUN Palangka Raya

Pada Tahun 2018 merupakan momentum peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Pada tanggal 10 Desember 2018 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Secara Elektronik di pengadilan. Peraturan tersebut terkait sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara peradilan/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan system elektonik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Administrasi perkara secara elektronik atau yang disebut *E-Court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara secara online (*E-Filling*).
b. Pembayaran biaya perkara secara online (*E-Payment*).
c. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban).

d. Pemanggilan online (*E-Summon*).

e. Penyampaian salinan putusan secara online.

Manfaat penggunaan aplikasi e-court dalam pendaftaran perkara secara online adalah sebagai berikut :

1. Mampu menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran panjar biaya dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank
3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi/media
4. Proses temu kembali data dengan lebih cepat.

Aplikasi e-court adalah aplikasi yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pada Tahun 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mewajibkan pendaftaran gugatan melalui Aplikasi E-Court. **Adapun jumlah perkara yang masuk melalui aplikasi E-Court pada tahun 2020 sebanyak 34 perkara (30 perkara, 2 FP dan 1 KI) dan pada tahun 2021 sebanyak 39 perkara (31 perkara, 3 FP dan 5 KI).**

- **Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di PTUN Palangka Raya**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah salah satu aplikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya khususnya informasi perkara dan persidangan.

Berikut adalah perangkat keras yang telah tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mendukung Teknologi Informasi khususnya SIPP:

1. Perlengkapan Server SIPP

No.	Perangkat	Ruang	Ket
1	Modem Astinet 4945136	Server	Line Fax
2	Mikrotik Routerboard 1100AHX2		Rack System
3	UPS APC 3.000 Watt		
4	Server Fujitsu Primergy RX1330 M1(Server SIPP)		
5	Switch Hub D-Link 10/100 switch Des 1016 D		
6	Rack Server		
7	PC dan CPU Inspur		
8	Printer Canon MX 497		
9	Server Fujitsu Primergy 1X1330M4 (Server SIPP pendukung E-Court)		

10	Rack Server Indo rack		
11	Modem Indihome 162401310399	Aula Depan (Lobby)	
12	Wireless Acces Point TP.Link	Aula (Ketua)	
13	Wireless Acces Point TP.Link	Perkara	
14	Wireless Acces Point Fiberhome	Aula Depan (Lobby)	

2. Perangkat PC, Laptop dan lain-lain sebagai Client Pengguna SIPP

No.	Perangkat	Ruang
1	-	Ketua
	Printer Canon PIXMA IP 2770	
2	Printer Canon PIXMA IP 2770	Wakil Ketua
3	PC Acer dan CPU Acer Intel Core i3	PTSP
	Wireless TP.Link	
	PC HP Intel Core i5 (Baru)	
	PC HP Intel Core i5 (Baru)	
	PC HP Intel Core i5 (Baru)	
	UPS APC 700 watts (Baru)	
	UPS APC 700 watts (Baru)	
	UPS APC 700 watts (Baru)	
	Scanner Canon 5600 F	
	Printer Canon PIXMA IP 2770	
4	PC dan CPU Lenovo Intel Core i5	Hakim
	Printer Canon G2010	
	Wireless TP. Link	
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Laptop Toshiba L635	
	Laptop Asus Vivobook 14 inci	
	Laptop Asus Vivobook 14 inci	
5	PC dan CPU Lenovo Intel Core i5	Panitera
	Printer Canon 62000	
	Wireless TP. Link	
6	PC Acer Intel Xeon 2.00 GB	Sub Bag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan
	Laptop Dell Intel Pentium Inspiron 11	
	CPU HP. Proliant ML 350	
	UPS ICA CE 1200	
	Printer PIXMA Canon G4010	
7	PC Intel Core i5	Panitera Muda Perkara
	PC Desktop Intel Core i5 (new 2021)	
	Laptop Fujitsu Intel Core i3 Lifebook E448	
	Voice Recorder (new 2021)	
	Printer Canon PIXMA IP 2770	
8	PC Compaq W1859	Staf Kepaniteraan Perkara
	PC Desktop Intel Core i5 (new 2021)	
	CPU Acer Intel Pentium (Aspire)	
9	PC Desktop Intel Core i5 (new 2021)	Panitera Muda Hukum
	Stavol Dankyu	
	Laptop Toshiba Satellite L510 Intel Core duo	

No.	Perangkat	Ruang
10	PC dan CPU Acer Intel Core i3	Panitera Pengganti
	PC dan CPU Acer Intel Core i3	
	PC dan CPU Acer Intel Core i3	
	Printer Canon PIXMA G1000	
	PC dan CPU Acer Intel Core i3	
11	PC dan CPU Lenovo Intel Core i3	Kasir
	Printer Canon PIXMA G2000	
12	PC Lenovo	Meja Informasi
13	Vestouch Interactive Android KiosK21,5	Pendukung E-Court
14	PC Samsung dan CPU Lenovo Intel Core i5	Lobby
15	PC Desktop Core i5 ACER	Ruang Sidang Utama (Sidang Online – Pengadaan 2021)
	PC Desktop Core i5 ACER	
	PC Desktop Core i5 ACER	
	TV Monitor 50 Samsung	
	Speaker YAMAHA DBR 12	
	Webcam Teleconference Logitech	
	Microphone Wireless Hardwell	
	Audio Mixer BEHRINGER	
	TV Led 40 Sharp	

4. Infrastruktur Local Area Network pendukung SIPP

Dalam upaya meningkatkan kecepatan akses terhadap Aplikasi SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sinkronisasi data SIPP Lokal dengan SIPP Mahkamah Agung, sinkronisasi data SIPP Lokal dengan SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan Sinkronisasi data SIPP Lokal dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung pada pelaksanaan upload putusan ataupun e-document upaya hukum. Bandwidth internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menggunakan jaringan internet pada Modem Astinet 4945136 dan didukung pula dengan jaringan internet untuk PTSP pada Modem Indihome 162401310399.

Adapun Topologi Jaringan Internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :

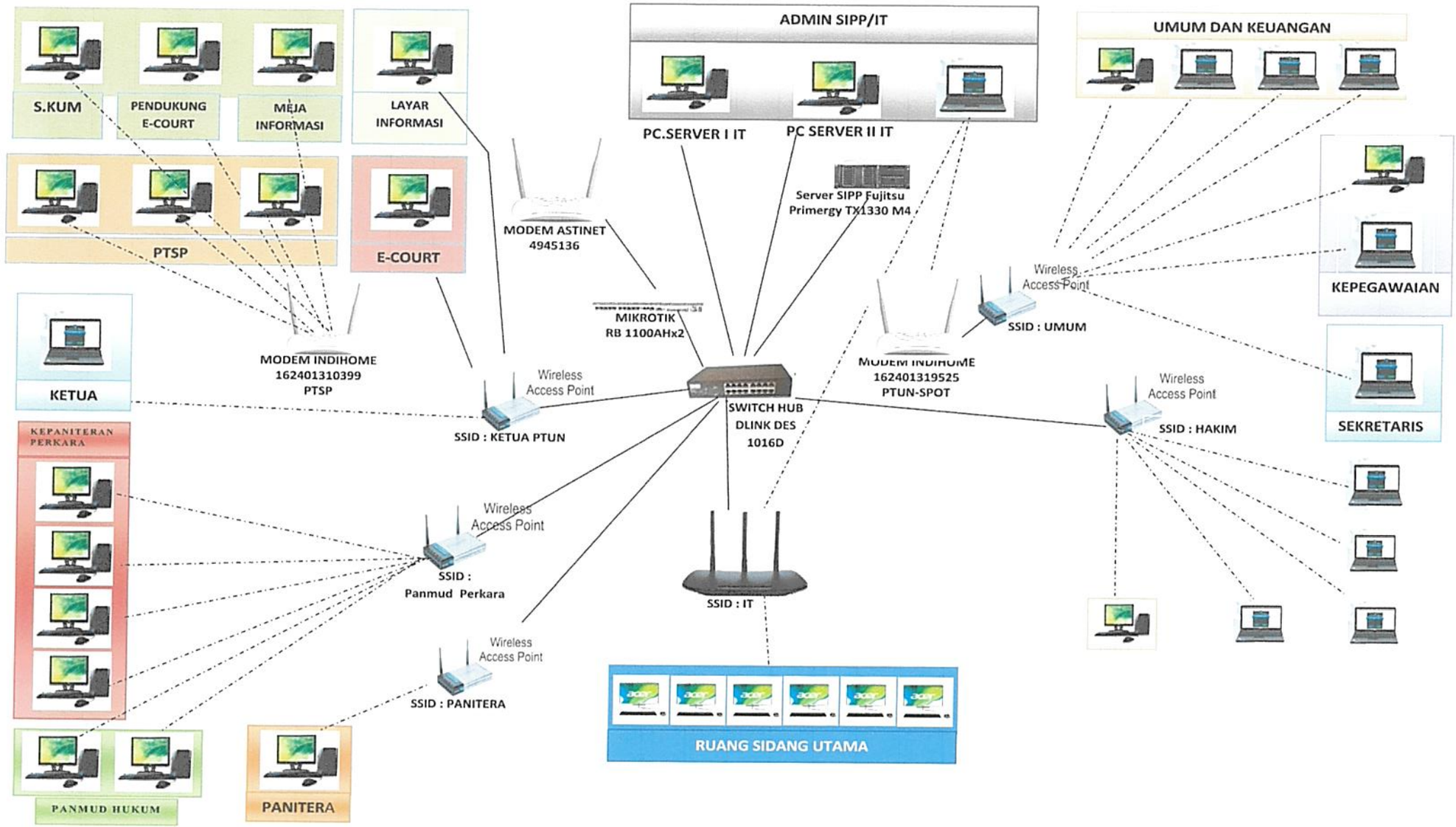
S.KUM
PENDUKUNG E-COURT
MEJA INFORMASI
LAYAR INFORMASI
PTSP
E-COURT
ADMIN SIPP/IT
PC.SERVER I IT
PC SERVER II IT
UMUM DAN KEUANGAN
Server SIPP Fujitsu Primergy TX1330 M4
MODEM ASTINET 4945136
KEPEGAWAIAN
MIKROTIK RB 1100AHx2
Wireless Access Point
SSID : UMUM
KETUA
MODEM INDIHOME 162401310399 PTSP
MODEM INDIHOME 162401319525 PTUN-SPOT
Wireless Access Point
SSID : KETUA PTUN
SWITCH HUB DLINK DES 1016D
Wireless Access Point
SSID : HAKIM
SEKRETARIS
KEPANITERAN PERKARA
Wireless Access Point
SSID : Panmud Perkara
SSID : IT
Wireless Access Point
SSID : PANITERA
RUANG SIDANG UTAMA
PANMUD HUKUM
PANITERA

Dan berikut adalah infrastruktur Local Area Network (LAN) dan Wireless Access Point (WAP):

a. 5 titik kabel yang langsung ke ruang server (Modem Astinet)
b. 3 buah Wireless Access Point yang langsung ke server
c. 6 titik kabel pada Modem Indihome 162401310399

Dengan tersedianya perangkat keras dan infrastruktur Local Area Network yang cukup, dapat memudahkan pengguna baik Hakim, Tenaga Teknis Kepaniteraan, maupun masyarakat mengakses data pada aplikasi SIPP.

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- **Akreditasi Penjaminan Mutu**

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance Excellent-ICPE*).

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2015.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

Pada Tahun 2018, Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mendapatkan Nilai C "Cukup"dengan skor 76,87 berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TAPM 13-TUN/QMR/SERTIFIKAT/V/2018.

Pada Tahun 2019, Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya meraih Nilai A "Excellent"dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TAPM.16-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2019 dengan skor 90,40

Kemudian pada Tahun 2021 Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nilai **A "Excellent"** kembali dipertahankan dengan nilai 92,07 berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: TSAPM.4.TUN/QMR/SERTIFIKAT/10/2021.

TAPM
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Mahkamah Agung RI
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor : TSAPM. 4-TUN/QMR/SERTIFIKAT/10/2021

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.4, Kota Palangkaraya
Prov. Kalimantan Tengah

Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini diberikan setelah dilaksanakan Surveillance II pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2021 dengan nilai 92,07 terakreditasi "A" (Sangat Baik).
Telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 13 Oktober 2021.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan
Peradilan Tata Usaha Negara

Lulik Tri Cahyaningrum

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur, terjangkau serta pelayanan yang prima, akuntabel, anti KKN, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan perubahan system pelayanan secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan arahan dan instruksi dari Direktur Jenderal Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 08 Agustus 2018.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian biaya panjar perkara hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

Sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk terus dapat memberikan pelayanan yang prima, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terus melakukan perbaikan sarana prasarana, salah satunya merehab Ruang PTSP menjadi lebih baik lagi serta juga terus berupaya melengkapi fasilitas yang ada di ruang PTSP seperti ruang tunggu, sarana administrasi dan penunjang lainnya.

Pada tahun 2021 sampai dengan diawal tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dilakukan rehab diberbagai sarana prasarana ruang PTSP diantaranya sebagai berikut :

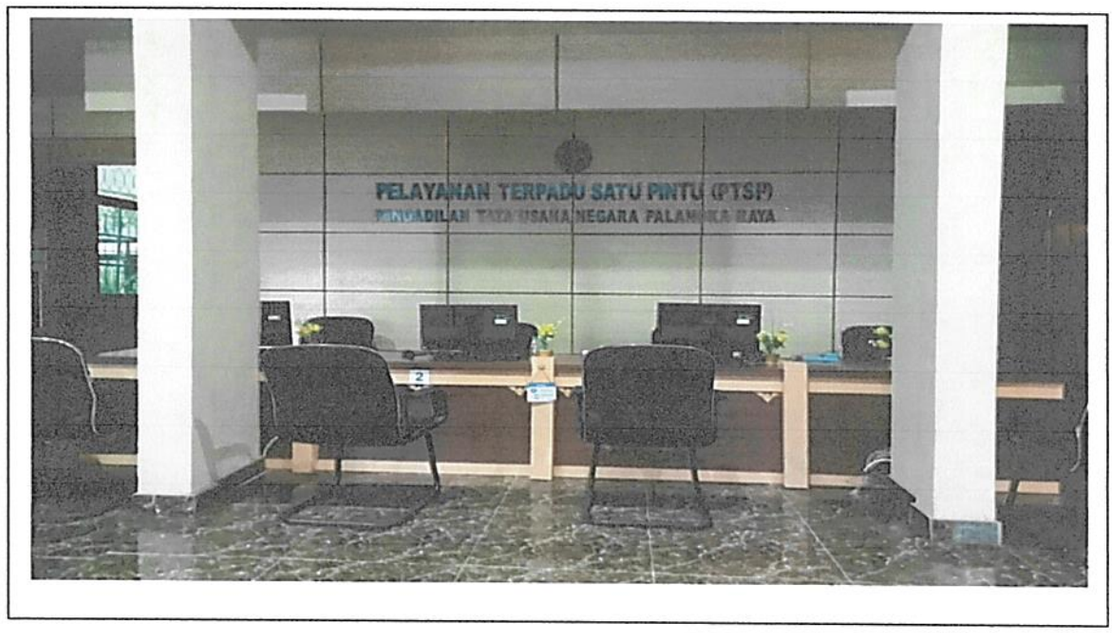

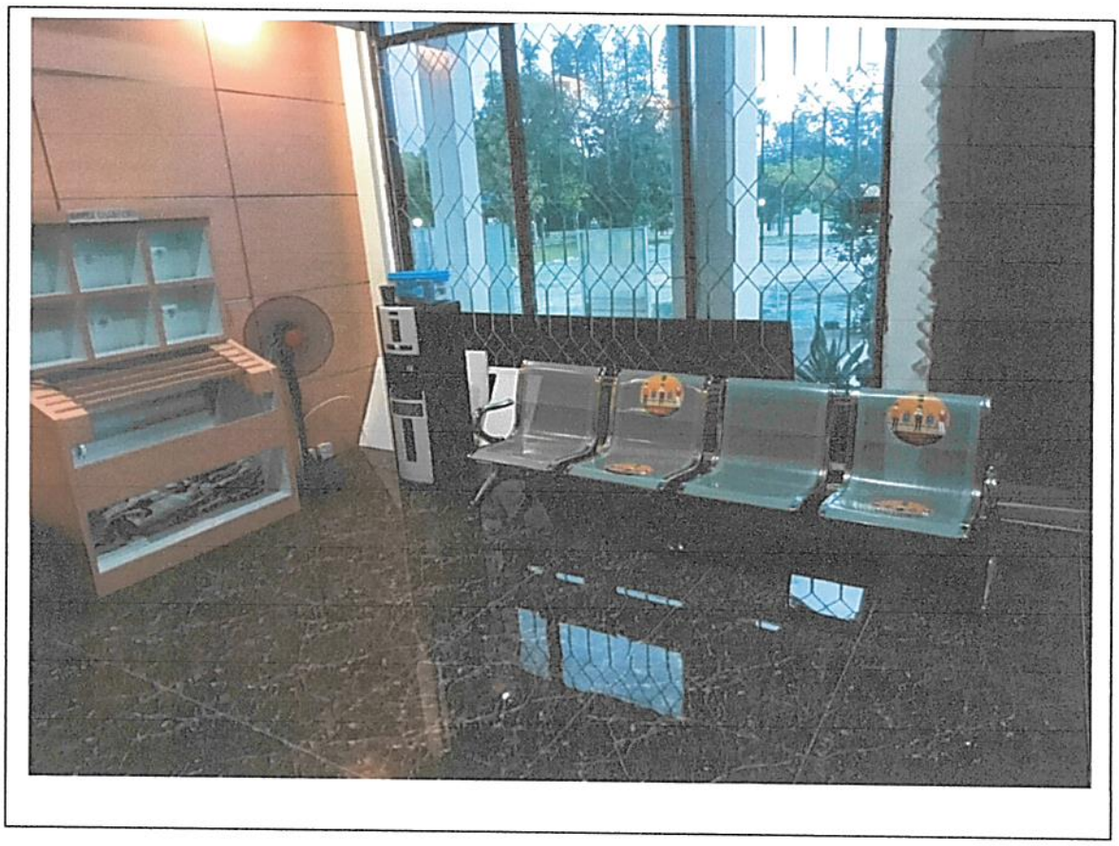

- **Inovasi Pelayanaan Publik**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melakukan banyak perubahan terutama dalam hal perbaikan sarana dan prasarana khususnya sarana dan prasarana PTSP. Dalam rangka meningkatkan pelayanan peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan inovasi pelayanan publik sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan inovasi pada Meja Kesekretariatan. PTSP pada Meja Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki tugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang dikeluarkan kesekretariatan. Surat Keluar dan Surat Masuk yang dikelola Meja Kesekretariatan dalam pelayanan sehari-hari masih bersifat manual sehingga sering terjadi berbagai permasalahan diantaranya pemakaian kertas yang relative tidak sedikit dan membutuhkan alokasi anggaran lebih untuk memenuhinya, disamping itu proses disposisi surat masuk/keluar yang cenderung lambat atau tidak tepat waktu dikarenakan proses disposisinya masih manual. Selain itu, permasalahan lain juga bisa disebabkan dikarenakan proses pengarsipan suratmasuk/keluar tidak memadai dikarenakan keterbatasan rak arsip dan penyimpanan arsip suratmasuk/keluar yang masih bersifat hardcopy berpotensi terhadap kerusakan, hilangnya dokumen dan berbagai kesulitan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan inovasi pelayanan public pada Meja Kesekretaritan PTSP yang diberi nama **Sistem Informasi Manajemen Persuratan (SIMANSUR)** .

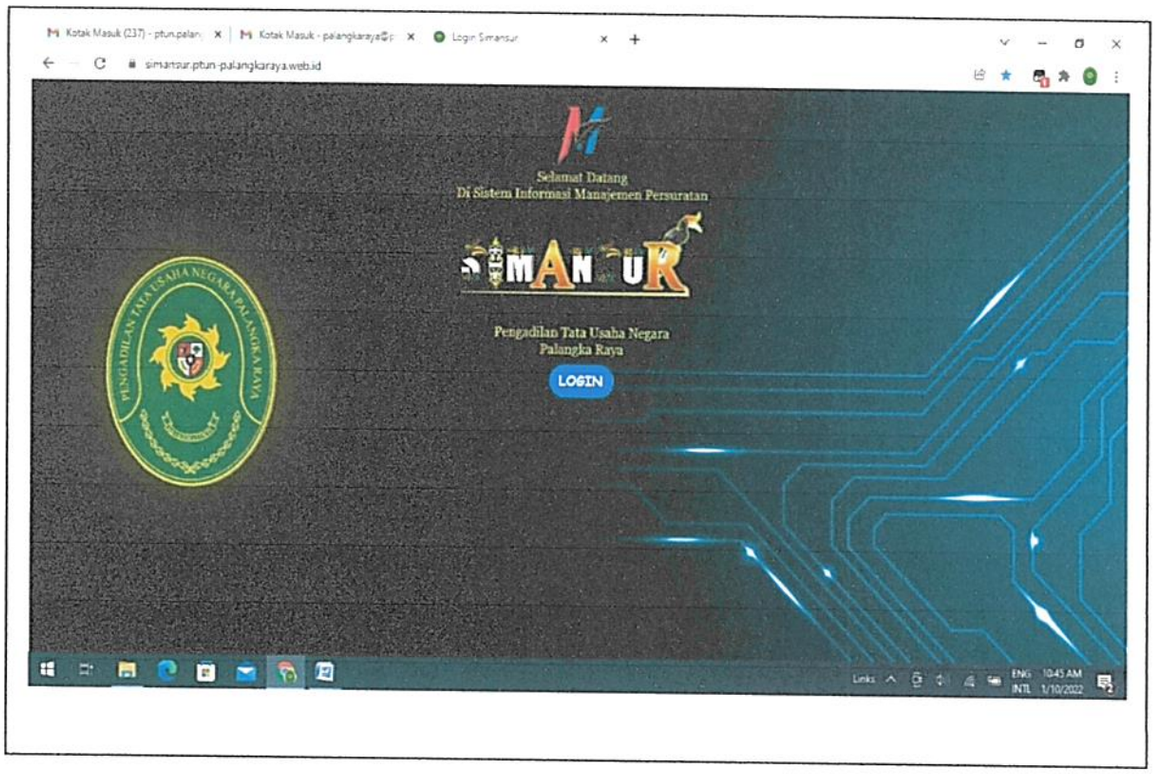
simansur.ptun-palangkaraya.web.id
Selamat Datang
Di Sistem Informasi Manajemen Persuratan
SIMANSUR
Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya
LOGIN

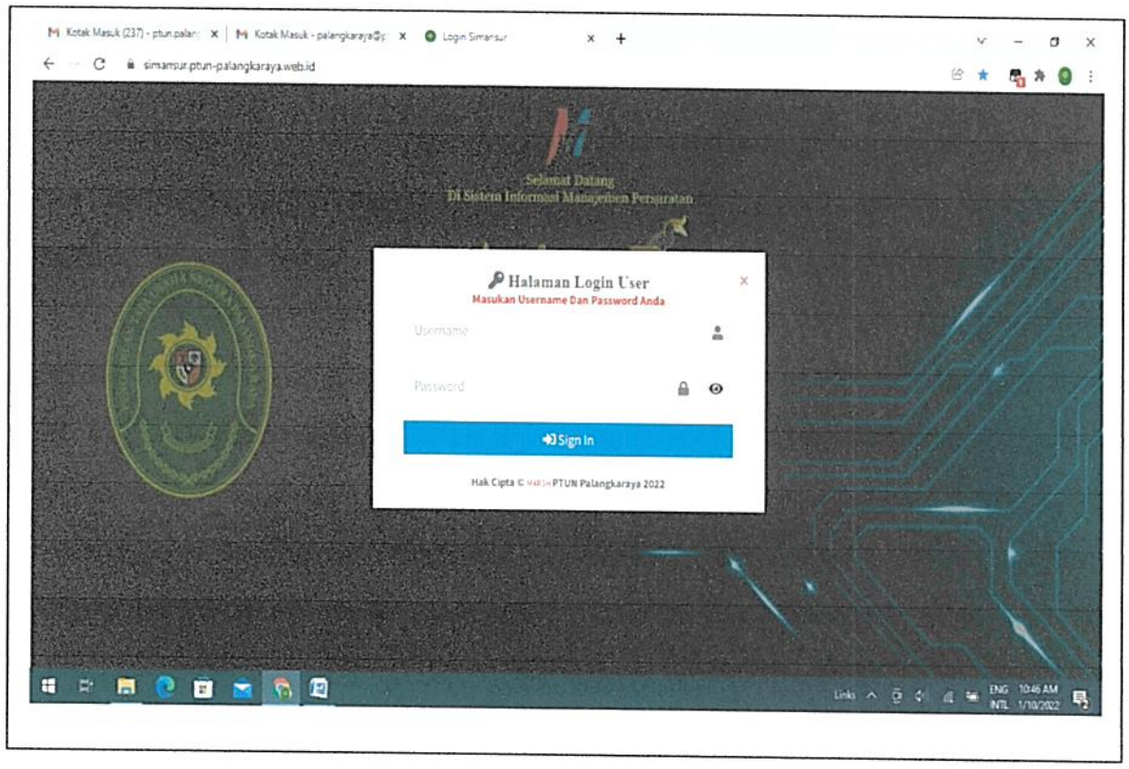
simansur.ptun-palangkaraya.web.id
Selamat Datang
Di Sistem Informasi Manajemen Persuratan
Halaman Login User
Masukan Username Dan Password Anda
Username
Password
Sign In
Hak Cipta © PTUN Palangkaraya 2022

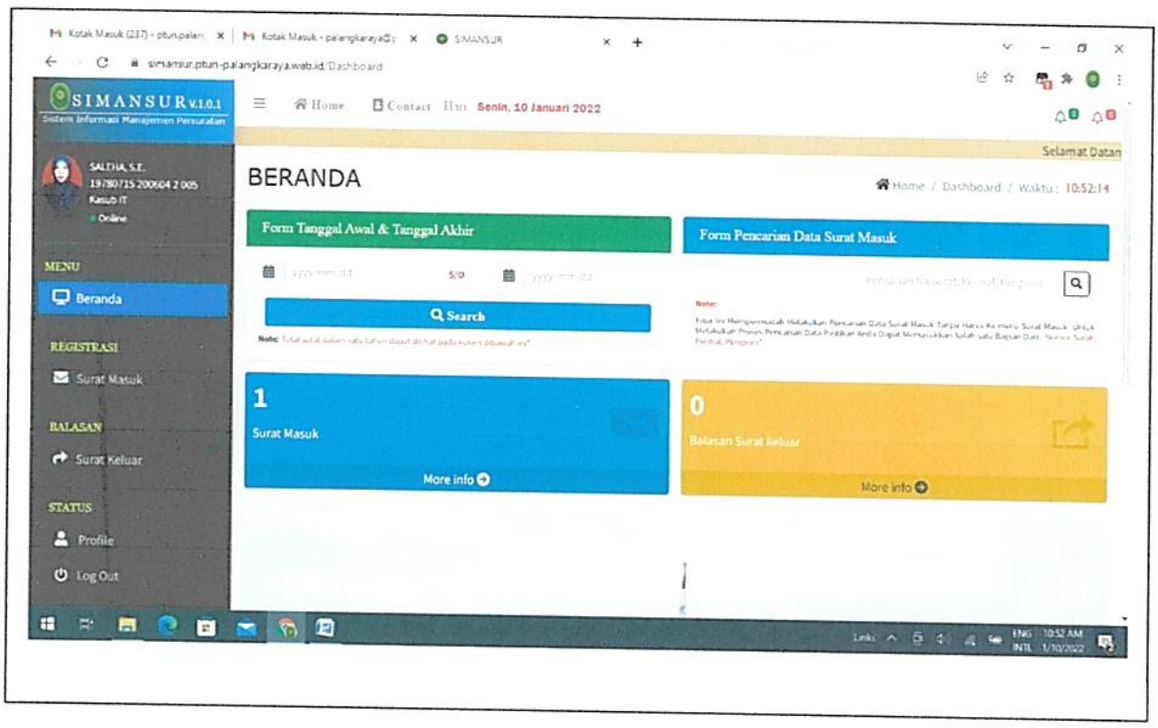
SIMANSUR v.1.0.1
Sistem Informasi Manajemen Persuratan
SALEHA, S.E.
19780715 200604 2 005
Kasub IT
Online
MENU
Beranda
REGISTRASI
Surat Masuk
BALASAN
Surat Keluar
STATUS
Profile
Log Out
Home
Contact
Hari Senin, 10 Januari 2022
Selamat Datan
BERANDA
Home / Dashboard / Waktu : 10:52:14
Form Tanggal Awal & Tanggal Akhir
Form Pencarian Data Surat Masuk
Search
1
Surat Masuk
More info
0
Balasan Surat keluar
More info

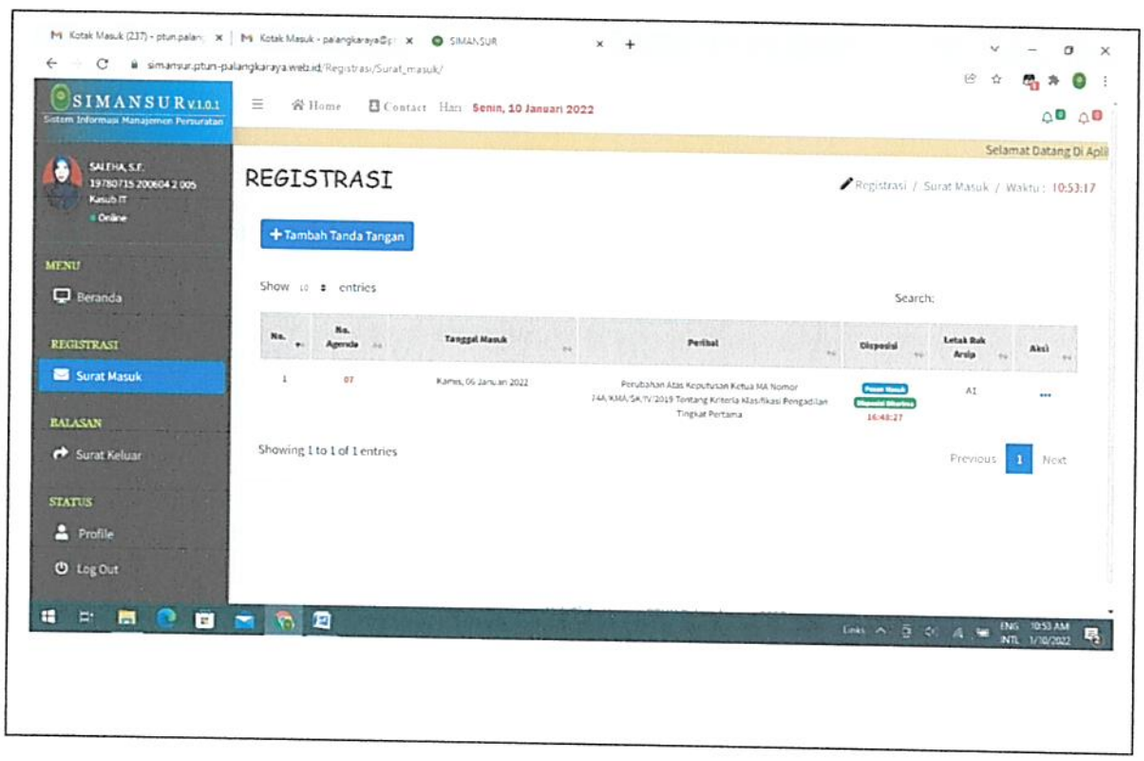
SIMANSUR v.1.0.1
Sistem Informasi Manajemen Persuratan
SALEHA, S.E.
19780715 200604 2 005
Kasub IT
Online
MENU
Beranda
REGISTRASI
Surat Masuk
BALASAN
Surat Keluar
STATUS
Profile
Log Out
Home
Contact
Hari Senin, 10 Januari 2022
Selamat Datang Di Apli
REGISTRASI
Registrasi / Surat Masuk / Waktu : 10:53:17
+ Tambah Tanda Tangan
Show 10 entries
Search:
No.
No. Agenda
Tanggal Masuk
Perihal
Disposisi
Letak Buk Arsip
Aksi
1
07
Kamis, 06 Januari 2022
Perubahan Atas Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/IV/2019 Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama
16:48:27
A1
Showing 1 to 1 of 1 entries
Previous
1
Next

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam penerapan dan optimalisasi sistem pengawasan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengawasan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan 2 (dua) sistem pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan Melekat

Adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektik dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pengawasan internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/843/K/PW.03.09/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

B. EVALUASI

Dalam melakukan tugas pengawasan, Hakim Pengawas Bidang harus senantiasa berpegang pada Buku IV Mahkamah Agung tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan.

Hakim Pengawas Bidang juga secara objektif menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas per 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) dan selanjutnya koordinator melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masing-masing bidang sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/843/K/PW.03.09/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS
1	H. AL'AN BASYIER, SH., MH NIP. 19750522 200012 1 001	PEMBINA TK. I (IV/b)	WAKIL KETUA/HAKIM MADYA MUDA PTUN P.RAYA	KOORDINATOR
2	TRI JOKO SUTIKNO, S.sos., S.H., M.H. NIP. 19801018 200912 1 001	PENATA (III/c)	HAKIM PRATAMA MADYA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
3	FAISAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. NIP. 19820416 200912 1 002	PENATA (III/c)	HAKIM PRATAMA MADYA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
4	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H NIP. 19940430 201712 2 006	PENATA MUDA (III/a)	HAKIM PRATAMA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN PERKARA
5	SEKAR ANNISA, S.H NIP. 19941109 201712 2 003	PENATA MUDA (III/a)	HAKIM PRATAMA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN HUKUM
6	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. NIP. 19901207 201712 2 001	PENATA MUDA (III/a)	HAKIM PRATAMA PTUN P.RAYA	PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gedung pengadilan yang belum memenuhi syarat/prototype seperti arahan Mahkamah Agung RI
2. Rumah Dinas Jabatan Hakim yang dimiliki Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 7 (tujuh) unit. Untuk Rumah Dinas Tenaga Teknis seperti Panitera/Panitera Pengganti belum tersedia.
3. Perlu adanya penambahan kendaraan bermotor dan mobil dinas khususnya untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dll
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak memiliki Generator Set untuk mengantisipasi setiap ada pemadaman aliran listrik.
5. Aplikasi Pengaduan Online (SIWAS Mahkamah Agung RI) memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan pengadilan dan kode etik pegawai.
6. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI memberikan informasi aktual proses perkara di pengadilan.
7. Aplikasi *e-Court* memudahkan advokat untuk mendaftarkan perkara tanpa harus datang ke Pengadilan.
8. Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) memudahkan kontrol pelaksanaan aplikasi SIPP.
9. Aplikasi SIMANSUR (Sistem Informasi Manajemen Persuratan) sebuah inovasi pelayanan publik untuk memudahkan tata kelola manajemen persuratan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

B. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu penambahan dana dalam DIPA tahun 2022 guna menunjang pelaksanaan pekerjaan melalui penambahan sarana dan prasarana.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berharap gedung pengadilan segera memenuhi kriteria/prototype seperti arahan dan petunjuk Mahkamah Agung RI.
3. Dengan adanya Sistem pengawasan yang efektif, dapat mencegah tindakan serta perilaku / perbuatan tercela yang dilakukan oleh setiap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ 843 /K/PW.03.09/IX/2021

TENTANG

HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Membaca : Ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang yang menyatakan bahwa Ketua mengatur tugas Para Hakim, serta Buku IV Mahkamah Agung Tentang Pengawasan;

Menimbang :
a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah Lembaga yang menyelenggarakan Fungsi Peradilan dalam bidang Teknis Peradilan, Pengelolaan Administrasi Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Umum Peradilan agar terwujud pelayanan publik yang baik;
b. Bahwa, untuk mengendalikan agar fungsi Lembaga Peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan Pengawasan terhadap setiap bidang secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan Rencana dan Peraturan yang berlaku;
c. Bahwa, Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masing-masing bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan;
d. Bahwa, untuk melakukan pengawasan setiap bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di pandang perlu membentuk Hakim Pengawas Bidang yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/036/SK/VII/1993, Tanggal 17 Juli 1993, Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/007/SK/IV/1994, Tanggal 1 April 1994, Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2004, Tanggal 24 Desember 2004, Tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 309/SEK/01/VIII/2007, Tanggal 31 Agustus 2007;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/099/WK/PW.03.09/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Kedua : Menunjuk Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum pada Lajur 2 dan 4 dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang;

Ketiga : Bahwa dalam melakukan tugas Pengawasan, Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk tersebut harus senantiasa berpegang pada Buku IV Mahkamah Agung tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan;

Keempat : Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara Obyektif dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas per 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) dan selanjutnya Koordinator Pengawas melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa Rekomendasi untuk ditindak lanjuti;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 September 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/ 843 /K/PW.03.09/IX/2021
Tanggal : 1 September 2021
Tentang : Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS HAKIM PENGAWAS
1	2	3	4	5
1	H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. NIP. 19750522 200012 1 001	Pembina Tk I (IV/b)	Wakil Ketua / Hakim Madya Muda PTUN Palangka Raya	KOORDINATOR
2	TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H. NIP. 19801018 200912 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
3	FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. NIP. 19820416 200912 1 002	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. NIP. 19940430 201712 2 006	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perkara
5	SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum
6	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. NIP. 19901207 201712 2 001	Penata Muda (III/a)	Hakim Pratama PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001